

**DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966**  
**(Tinjauan dari Segi Politik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Disusun oleh :

Nama : Muji Lestari

NIM : 001314010



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2005**

**DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966**

**(Tinjauan dari Segi Politik)**

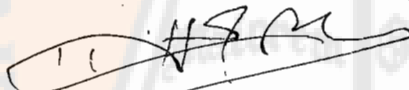
Oleh

Muji Lestari

001314010


Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

Tanggal 19 Mei 2005

Pembimbing II

  
Drs. Sutarjo Adikusilo, J.R.

Tanggal 20 Mei 2005

**DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966**

**(Tinjauan dari Segi Politik)**

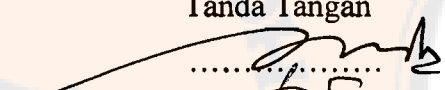
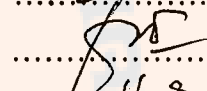
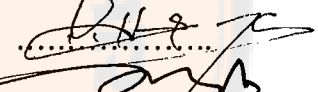

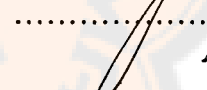
Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Nama : Muji Lestari

NIM : 001314010

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 10 Juni 2005  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Susunan Panitia Penguji**


Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.	
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.	
Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.	
Anggota : Drs.A.A. Padi	

Yogyakarta, 10 Juni 2005

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



  
Dekan  
Drs. M. Mardet Soewandi, M.Pd.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Malam ini aku kalut dalam kelam beku  
Menanti lilin kecilku yang terbawa pergi  
Dian redupnya pun masih membekas  
Dalam pori yang semakin ciut, yang mengiring pekat malam-malamku  
Meskipun saat ini,  
Ku genggam setumpuk kembang api yang pasrah indahnya ku ambil  
Tetapi  
Ku inginkan lilin kecilku mengiring pekat malam-malamku  
Lilin kecilku dimanapun dirimu  
Aku ingin tetap mengharapmu.....*

*Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini ku  
persembahkan untuk  
Bapak dan Mamak serta Ketiga kakak dan adikku Mbak Muji,  
Mbak Tie, Maz To, adek Megga  
Maz Tutut yang selalu mendampingi dan mencintaiku  
Keluarga besarku di Ketapang*

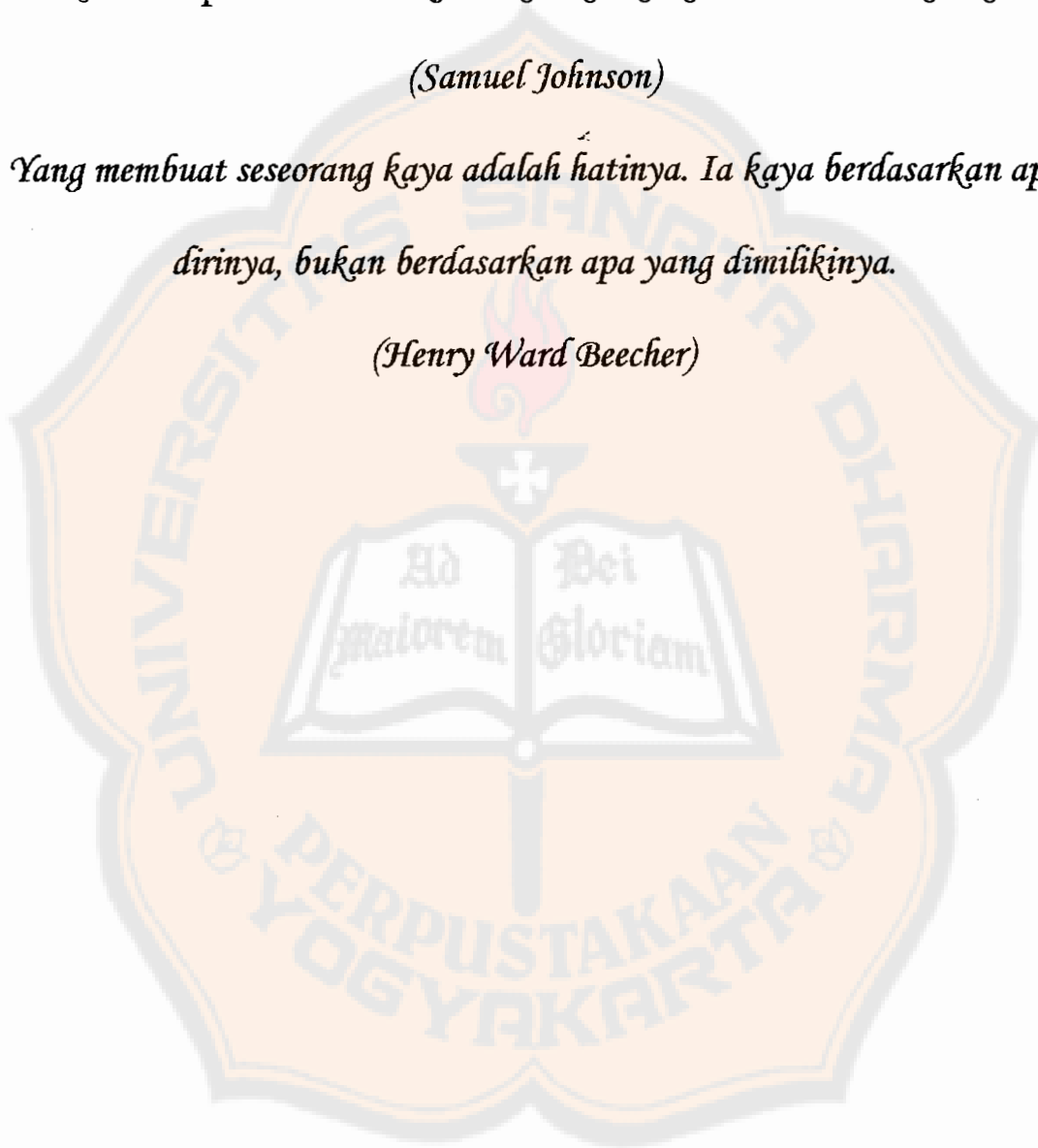
HALAMAN MOTTO

*Kita mampu berbuat baik, bahkan ketika kita merasa tidak suka.*

*(Samuel Johnson)*

*Yang membuat seseorang kaya adalah hatinya. Ia kaya berdasarkan apa dirinya, bukan berdasarkan apa yang dimilikinya.*

*(Henry Ward Beecher)*



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 9 Mei 2005

Penulis



Muji Lestari



**ABSTRAK**  
**DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966**  
**(Tinjauan dari Segi Politik)**  
**Oleh: Muji Lestari**

Skripsi yang berjudul “Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1966 (Tinjauan dari Segi Politik)” memiliki tujuan untuk membahas serta menganalisa tiga permasalahan pokok yaitu: 1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin; 2. Bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin; 3. Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan politik Demokrasi Terpimpin.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah politik. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Demokrasi Terpimpin lahir karena pada masa Demokrasi Parlementer sering terjadi pergantian kabinet dan menutup kemungkinan adanya partisipasi politik yang berdampak pada krisis ekonomi dan sosial. Untuk memperbaiki situasi politik yang tidak stabil Presiden Sukarno mengganti Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin.

Ada dua usulan konsepsi Presiden Sukarno untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin yaitu pertama dibentuknya kabinet gotong royong yang mewakili semua partai politik dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi ini perlu membuat Kabinet Kaki Empat yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI untuk menciptakan kegotong royongan nasional. Kedua pembentukan suatu dewan nasional dibawah kepemimpinannya yang dapat memusyawarahkan politik nasional. Konsepsi ini bertujuan untuk memperjuangkan persatuan dan menciptakan kerukunan antara aliran-aliran politik yang saling berlawanan. Selain itu pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin berdasar pada Manifesto Politik, dimana Manifesto Politik merupakan penjelasan dari Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Presiden Sukarno dapat menyatukan kekuatan-kekuatan dan keseimbangan atas negara RI yang didukung oleh partai-partai dan militer dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Namun pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mengalami kehancuran disebabkan karena Presiden Sukarno tidak dapat menjaga keseimbangan antara militer dan PKI. Sehingga terjadi peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965.

**ABSTRACT**  
**GUIDED DEMOCRACY 1959-1966**  
**(A POLITICAL REVIEW)**  
**By: Muji Lestari**

This thesis has title “Guided Democracy 1959-1966 (A Political Review)”. It has objective to discuss and analyze the following three major problems: 1. What factors were being backgrounds of the Guide Democracy politics? 2. What were steps in implementing the Guide Democracy politics? 3. What factor did make the success and failure of the Guide Democracy politics?

The writer used historical method in writing this thesis that comprised heuristic, resource critique, interpretation and historiography. Political approach was use to complete this thesis that was descriptive analysis in nature.

The results were as follows: Guided Democracy was born because in Parliamentary Democracy era, cabinet replacement was often taken place that prevented political participation and in turn had impact on economic and social crises. To fix this unstable political situation, the President Soekarno replaced the Parliamentary Democracy with Guided Democracy.

President Soekarno proposed a conception to implement Guided Democracy as follows: establishing *gotong royong* (mutual cooperation) that represented all political parties and organizations based on balance force, which existed in society. This conception required forming four legs cabinet consisted of PNI, Masyumi, NU and PKI to create national mutual cooperation. The establishment of a national board under his leadership was hoped to be able to discuss national politics. This conception intended to struggle for unity and to create harmony between different political ideologies. In addition, the implementation of Guided Democracy politics based on Political Manifesto was an explanation of the Presidential Decree on July 5, 1959.

President Soekarno could unite forces and balances on Republic of Indonesia State that was supported by parties and military in fight to free West Irian from the Dutch. Nevertheless, the implementation of the Guided Democracy politic was fail due to the President Soekarno’s failure in keeping balance between military and PKI (Indonesian Communist Party) that triggered a bloody event of September 30, 1965.



**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Berkah dan Rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Demokrasi Terpimpin 1959-1966 (Tinjauan dari Segi Politik)”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma yang telah memberi ijin atas penulisan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Pendidikan sejarah yang telah memberikan pandangan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H, selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan tugas belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Segenap dosen dan karyawan FKIP khususnya pendidikan sejarah yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Agnes-Coy, Eka-Jefri, Vivin-Arif, Yesi-Yanto, Oni-Eko, Yuli, Srix Pawanti, Martini, Adi, Erwin, Bowo, Maria, Agung, Iel, Andi, Andi”Iting”, Edwie, Janawir, Bono yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan menyadari segala kekuatan dan kelemahan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Situasi Politik Sebelum Demokrasi Terpimpin.....	1
2. Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin.....	5
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kajian Teori.....	16

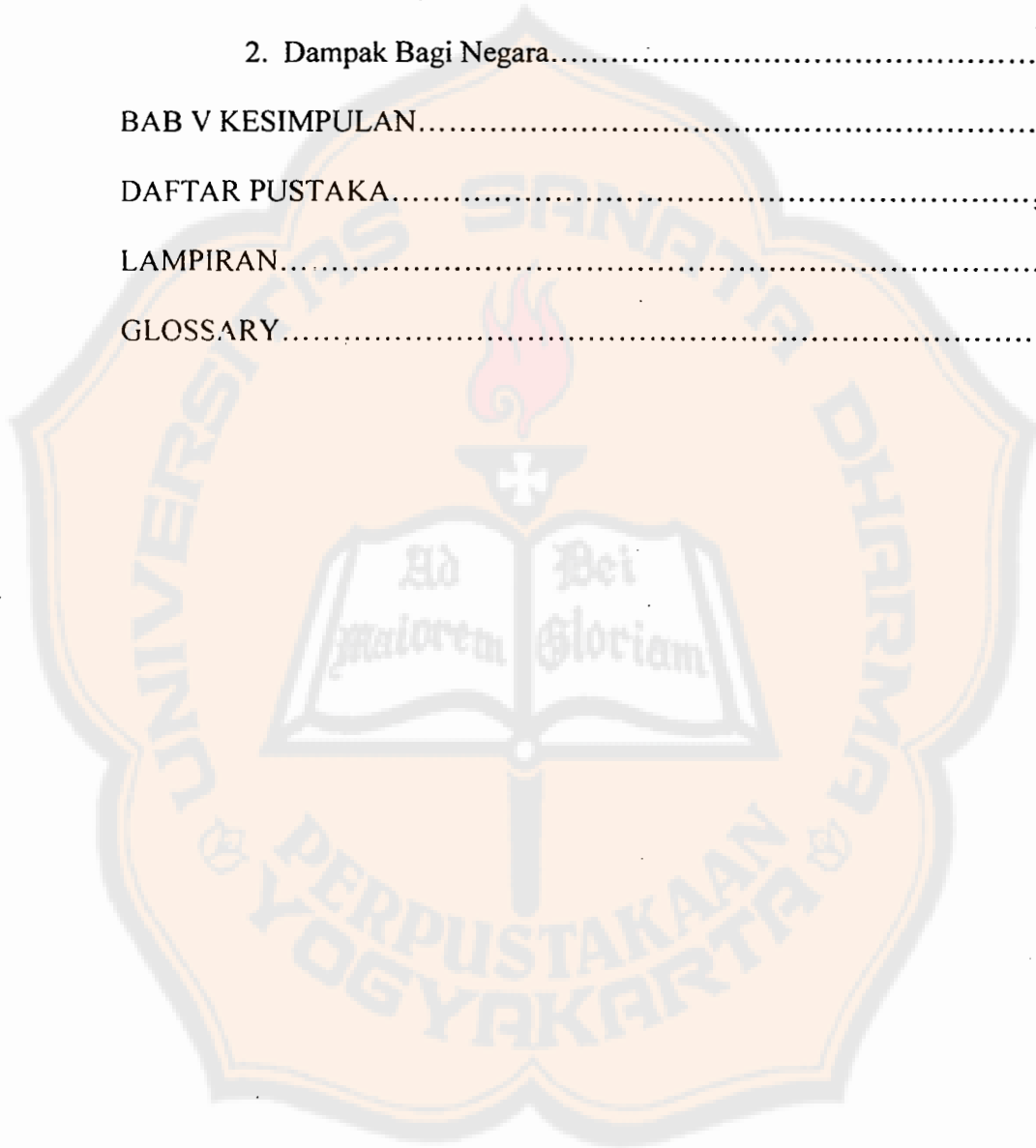


# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Hipotesis.....	19
H. Metodologi Penulisan.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI LAHIRNYA</b>	
<b>POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN.....</b>	<b>24</b>
A. Faktor Politik.....	24
B. Faktor Ekonomi.....	29
C. Faktor Sosial.....	32
<b>BAB III TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN POLITIK DEMOKRASI</b>	
<b>TERPIMPIN.....</b>	<b>34</b>
A. Konsep Politik Sukarno pada Masa Demokrasi Terpimpin.....	34
B. Pelaksanaan Politik Demokrasi Terpimpin.....	37
C. Reaksi TNI-AD Terhadap Politik Demokrasi Terpimpin.....	45
D. Reaksi PKI Terhadap Politik Demokrasi Terpimpin.....	49
E. Kelompok yang Menentang Politik Demokrasi Terpimpin.....	51
<b>BAB IV FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN DAN</b>	
<b>KEGAGALAN POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN.....</b>	<b>54</b>
A. Keberhasilan dalam Membebaskan Irian Barat.....	55
1. Faktor Penyebab Keberhasilan.....	55
2. Sumbangan Terhadap Negara.....	60

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kegagalan Terjadi Pemberontakan G. 30. S.....	61
1. Faktor Penyebab Kegagalan.....	61
2. Dampak Bagi Negara.....	66
BAB V KESIMPULAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76
GLOSSARY.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Silabus.....	76
Lampiran II	: Gambar Presiden Membacakan Dekrit.....	79
Lampiran III	: Dekrit Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada UUD 1945.....	80
Lampiran IV	: Gambar Presiden Memberikan Komando Pembebasan Irian Barat.....	85
Lampiran V	: Teks Tri Komando Rakyat.....	86
Lampiran VI	: Teks Persetujuan/Perdjandjian New York.....	87
Lampiran VII	: Naskah Rentjana Resolusi Indonesia-Belanda Diterima oleh PBB.....	93
Lampiran VIII	: Pernyataan Pendapat DPR - GR.....	94
Lampiran IX	: Glossary.....	97

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

**1. Situasi Politik sebelum Demokrasi Terpimpin**

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI dengan aklamasi memilih Sukarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Undang-Undang yang digunakan yaitu UUD 1945.<sup>1</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia.

Proklamasi dikumandangkan diseluruh tanah air, bahkan sampai ke seluruh dunia. Perjuangan Bangsa Indonesia tidak hanya sampai disini, masih panjang perjalanan yang harus dilalui untuk sampai pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Setelah mencapai kemerdekaan, Bangsa Indonesia harus melawan revolusi yang terjadi diberbagai wilayah seperti Semarang, Bandung, Yogyakarta dan kota-kota lainnya demi mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan awal dari revolusi.

Setelah kemerdekaan berjalan terjadi suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem Presidensial menjadi Parlementer. Dengan adanya

---

<sup>1</sup> Dahm, Bernhard: 1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES, hlm. 389.



perubahan ini Presiden Sukarno hanya berfungsi sebagai kepala negara dan tidak berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Walaupun UUD 1945 tetap berlaku maka Presiden Sukarno hanya sebagai simbol.

Pengalihan sistem pemerintahan dari Presidensil ke Parlemitter bertentangan dengan konstitusi, namun dalam kenyataannya konstitusi tidak dipermasalahkan, bahkan hukum-hukum revolusi lebih ditaati dari pada konstitusi. Pada tahun 1949 dalam konstitusi RIS pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, pada masa konstitusi pemerintah memegang kekuasaan ko-legislatif bersama DPR dalam berbagai hal. Pemerintah mempunyai hak inisiatif dan persetujuannya diperlukan untuk semua perundang-undangan. Presiden adalah kepala negara dan panglima tertinggi angkatan perang dipilih oleh sidang bersama senat dan DPR. Sukarno dengan suara bulat dipilih menjadi presiden RIS yang pertama dan terakhir. Selain itu Presiden Sukarno menjabat sebagai presiden RI.<sup>2</sup> Namun konstitusi RIS tidak bertahan lama, kemudian konstitusi RIS kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan konstitusi sementara RIS diubah menjadi UUDS 1950 disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Sistem politik yang digunakan oleh UUDS 1950 adalah Demokrasi Parlemitter, dimana Soekarno hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara, sedangkan tanggung jawab pemerintahan ada pada Kabinet. Dalam sistem yang demikian, Presiden praktis hanya berpangku tangan. Sukarno tidak

---

<sup>2</sup>Moedjanto: 1989, *Indonesia Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 68-69.



menyukai kedudukan yang demikian, walaupun hal itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kebencian Sukarno akan kedudukan seperti ini melalui pemberontakannya terhadap garis-garis konstitusi, dimana beliau harus tunduk pada kebijaksanaan yang diambil oleh Perdana Menteri dan Kabinet baik menyangkut masalah dalam maupun masalah Luar Negeri.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan menurut UUDS 1950 adalah sistem kabinet parlementer/demokrasi parlementer, dimana setiap Kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan mayoritas dalam Parlemen. Apabila mayoritas dalam Parlemen tidak mendukung Kabinet, maka Kabinet harus mengembalikan mandat kepada Presiden dan kemudian dibentuk Kabinet baru.<sup>4</sup> Pada masa ini partai-partai mempunyai peranan yang sangat besar terutama pada pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada anggota DPR yang dipilih pada umumnya adalah orang-orang partai.

Pada masa Demokrasi Parlementer Indonesia terpecah belah dan terjadi pengelompokan, sehingga sulit untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu Demokrasi Parlementer menutup kemungkinan pintu partisipasi politik bagi sejumlah kekuatan yang sudah membuktikan dirinya sebagai pusat-pusat kekuasaan, Angkatan Darat yang berjasa selama perang kemerdekaan dilarang masuk

---

<sup>3</sup> Nazaruddin Sjamsuddin(ed): 1988, *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 15.

<sup>4</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 114.

ke dalam politik kepartaian dan orang yang memiliki kharisma dan ambisi yang besar di Indonesia hanya diberikan kedudukan Presiden simbolis.<sup>5</sup>

Sehingga Pada masa Demokrasi Parlementer menyebabkan politik Indonesia tidak stabil. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Partai-partai yang berkoalisi tidak dapat berperan secara aktif dan saling menjatuhkan hal ini membawa dampak negatif pada masa Demokrasi Parlementer yang dapat menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet.

Tatanan politik pada masa ini menghadapi tantangan. Selain itu tatanan politik ini kurang memperlihatkan kesiapsiagaan dalam mempertahankan diri untuk meghadapi keadaan krisis tersebut. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit diantara para tokoh partai dalam memperbaiki tatanan politik.

Untuk mencari jalan keluar dalam pemecahan masalah tersebut maka adanya usul-usul yang berasal dari masing-masing tokoh. Usulan yang pertama berasal dari Presiden Sukarno yang mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin pada bulan Februari 1957. Presiden menghendaki pembentukan suatu Kabinet yang semua partai besar akan mengambil bagian dalam pembentukan suatu Dewan Nasional, yakni sebuah badan penasehat tingkat tinggi yang didalam badan itu terdiri dari berbagai

---

<sup>5</sup>Sundhaussen, Ulf: 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Pungsi ABRI*, Jakarta, LP3ES, hlm. 209-210.

kelompok golongan fungsional, buruh, tani, pengusaha nasional, akan diwakili dan akan bekerja berdasarkan konsensus.

Kemudian usulan yang kedua berasal dari tokoh-tokoh daerah terutama yang berkuasa di Sumatera Tengah dan Selatan dan di Indonesia Timur. Usulan ini datang setelah bulan Maret 1957. Pemecahan yang mereka usulkan adalah "Pemulihan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta" yaitu pengembalian Hatta sebagai Perdana Menteri, mereka memihak kepada tuntutan otonomi daerah, kekuasaan yang lebih besar dan anti komunis.<sup>6</sup>

Dengan adanya penyelesaian secara damai tersebut, maka pada pertengahan tahun 1958 telah tercipta basis keseimbangan politik yang mantap. Dengan kemantapan politik ditandai dengan runtuhnya Demokrasi Konstitusional. Runtuhnya Demokrasi ini diganti dengan Demokrasi Terpimpin yang harapannya supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan yang diharapkan oleh rakyat.

## **2. Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin**

Situasi politik yang tidak stabil pada masa Demokrasi Konstitusional, berpengaruh pada seringnya terjadi pergantian Kabinet dengan program pemerintah yang berbeda-beda. Ketidakstabilan politik yang terjadi menyebabkan Demokrasi Konstitusional runtuh. Sebagai pengganti Demokrasi Konstitusional Sukarno memilih Demokrasi Terpimpin. Karena Demokrasi Terpimpin memperoleh sistem pemerintah

---

<sup>6</sup>Feith, Herbert: 1995, *Soekarno Militer dalam Demorasi Terpimpin*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. hlm. 20.

yang kuat dan berwibawa pada akhirnya akan sanggup mengakhiri krisis politik serta memulihkan ketertiban.

Munculnya gagasan tentang Demokrasi Terpimpin berawal dari keprihatinannya terhadap seringnya terjadi pergantian Kabinet tanpa bisa menyelesaikan program kerjanya. Hal ini merupakan penghalang pembagian serta melemahnya pengaruh dan kewibawaan partai dan Parlemen. Dengan demikian muncul gagasan Demokrasi Terpimpin, karena Demokrasi Terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang kuat dan berwibawa pada akhirnya akan sanggup mengakhiri krisis politik serta memulihkan ketertiban negara.

Pada bulan Februari 1959 pemerintah bersikeras untuk kembali ke UUD 1945. Sidang konstituante tidak mau memberikan dua pertiga suaranya untuk mendukung ide itu. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno membubarkan konstituante dan mengajukan kembali undang-undang jaman revolusi melalui dekrit.

Presiden Sukarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat, isinya ialah pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.<sup>7</sup> Setelah kegagalannya dalam sistem Parleментар dengan konstitusi 1950 maka muncullah Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi disegala bidang kenegaraan dan

---

<sup>7</sup> Moedjanto: 1988, *op. cit.*, hlm. 114.

kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi. Menurut UUD 1945 Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuju masyarakat adil dan Makmur.<sup>8</sup> Prinsip ini telah dikenal masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi terpimpin merupakan praktek demokrasi yang sejati.

Namun penerapan Demokrasi Terpimpin tidak berjalan mulus karena terjadi perubahan sosial yang besar terutama dibidang politik. Partai-partai politik yang sebelumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pembangunan bangsa baik dibidang politik maupun ekonomi, pada masa ini tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menentukan nasib negara. Partai-partai yang ada diperkecil sehingga organisasi politik kehilangan otonomi dalam menentukan tujuan politiknya. Partai-partai yang ada mendapat pengawasan yang ketat dari militer dan peraturan-peraturan preventif kepolisian. Kegiatan politik masih boleh berjalan asalkan tidak bertentangan dengan manifesto politik (manipol).<sup>9</sup> Apabila dalam pelaksanaannya partai melanggar batas yang telah ditentukan maka presiden tidak segan-segan mencabut pengakuan partai tersebut dan menonaktifkan kegiatan partai tersebut. Partai politik pada masa ini tidak berdaya dalam menghadapi presiden yang didukung oleh angkatan

---

<sup>8</sup> Darmowijoyo, Djadji: 1964, *Uraian Manipol*, Yogyakarta, Majelis Umum Taman Siswa, hlm. 56.

<sup>9</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (ed): 1988, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta, LP3ES, hlm. 111.



bersenjata, kegiatan politik menjadi sunyi. Presiden Sukarno tetap tidak tersaingi dalam kedudukan puncak struktur kekuasaan.

Sebagai alat Demokrasi Terpimpin Sukarno membentuk badan-badan yang langsung berada dibawah komandonya seperti DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPN (Dewan Perancang Nasional) dan MPN (Majelis Pimpinan Negara). Ia juga membentuk badan-badan yang akan membantunya pada waktu Negara dalam keadaan darurat yaitu badan yang mencerminkan masyarakat seperti Front Nasional, BPPK (Badan Pengarahan Potensi Kerja), KOTI (Komando Operasi Tertinggi), KOTOE (Komando Operasi Tertinggi Ekonomi) dan PARAN (Penertiban Aparatur Negara).<sup>10</sup>

Pada masa Demokrasi Terpimpin banyak terjadi perselisihan, walaupun perselisihan ini tidak sampai ke permukaan. Adapun perselisihan ini mengenai pengertian Demokrasi Terpimpin. Bagi Sukarno Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem yang dipimpin oleh satu pimpinan yaitu dirinya sendiri. Sementara pimpinan Angkatan Darat selaku pendukung kembalinya ke UUD 1945 berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah suatu sistem yang dipimpin oleh satu orang, melainkan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.<sup>11</sup> Perbedaan yang sangat mendasar inilah yang menjadi permasalahan selama Demokrasi Terpimpin.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>11</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 24.

Namun kenyataannya Demokrasi Terpimpin dapat berjalan walaupun banyak rintangan dan hambatan. Tokoh-tokoh yang tidak senang dengan keberadaan Demokrasi Terpimpin berusaha ingin menjatuhkan Demokrasi Terpimpin tersebut. Untuk mempertahankan Demokrasi Terpimpin, Sukarno berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PNI, PKI dan NU, supaya partai-partai tersebut mendukung dan memihak kepadanya. Sampai saat ini Sukarno berhasil menciptakan keharmonisan ditingkat nasional.

Sukarno mengutarakan ide Demokrasi Terpimpin karena menurutnya Demokrasi Terpimpin sangat cocok dengan rakyat Indonesia. Gagasan Demokrasi Terpimpin banyak didominasi oleh kepribadian Sukarno, walaupun prakarsa untuk pelaksanaannya diambil bersama dengan pimpinan angkatan bersenjata. Sebagai titik tolak dari Demokrasi Terpimpin yaitu dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sesuai dengan sifat dan jiwa bangsa Indonesia.

Dalam penerapan Demokrasi Terpimpin, Sukarno tidak menghendaki adanya peniruan bentuk konstruksi politik dari negara lain terutama negara Barat. Karena dalam Demokrasi Terpimpin untuk mengambil suatu keputusan dilaksanaka secara musyawarah mufakat sehingga hak minoritas tidak terabaikan. Maka Demokrasi Terpimpin dianggap demokrasi yang sangat cocok bagi bangsa Indonesia.

Langkah-langkah untuk melaksanakan gagasan Demokrasi Terpimpin adalah dengan dikeluarkannya Konsepsi Presiden. Konsepsi politik yang diajukan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari

1957 ada dua usulan. Konsepsi yang pertama Sukarno menyarankan dibentuknya kabinet gotong royong yang mewakili semua partai politik. Konsepsi yang kedua adalah Sukarno mengusulkan pembentukan suatu dewan nasional dibawah kepemimpinannya yang dapat memusyawarahkan politik nasional. Dengan adanya konsepsi Presiden tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin maka dikeluarkanlah Dekrit presiden 5 Juli 1959 maka UUD 1945 berlaku kembali dan dijadikan konstitusi Republik Indonesia. Sukarno sebagai Presiden langsung memimpin pemerintahan berdasarkan UUD 1945, maka Presiden tidak hanya sebagai kepala negara melainkan sebagai kepala Pemerintahan. Hal ini merupakan langkah awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ini mengalami keberhasilan dan kegagalan. Salah satu keberhasilannya yaitu pembebasan Irian Barat sehingga pihak Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada RI dalam perjanjian New York 15 Agustus 1962. Sedangkan kegagalannya terjadi peristiwa berdarah Gerakan 30 September tahun 1965.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin?
2. Bagaimanakah tahap-tahap pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan politik Demokrasi Terpimpin?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan politik dalam negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1966.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor yang melatar belakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin.
- b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tahap-tahap pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin.
- c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan politik Demokrasi Terpimpin.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu bahwa penelitian untuk ilmu pengetahuan sosial.

2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan menambah informasi tentang sejarah nasional Indonesia khususnya tentang politik demokrasi terpimpin.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang politik demokrasi terpimpin.

#### E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber berupa sumber tulisan yang diperoleh melalui buku. Buku yang digunakan oleh penulis adalah buku yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun buku pokok yang di gunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, karangan Legge, J ,D, Tahun 1985, buku ini berisi tentang pembentukan demokrasi terpimpin dilaksanakan dengan jalan kembali ke UUD 1945 dan pada bulan Februari mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Kemudian pada 5 Juli Presiden Sukarno membubarkan Dewan Konstituante dan mengumumkan dekrit penerimaan UUD 1945 yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli. Dan pada bab petualangan Luar Negeri dan

keseimbangan Dalam Negeri yaitu mengenai masalah Irian Barat yang diperjuangkan sejak tahun 1962 yang merupakan tahun kemenangan Indonesia. Namun setelah kemenangan Irian Barat terjadi pertentangan antar Negara-negara lain yaitu Malaysia. Menjelang tahun 1965 stabilitas politik Indonesia menjadi kalut, yang membawa krisis di Indonesia dengan hancurnya gerakan oposisi BPS dan Indonesia keluar dari PBB. Dengan adanya peristiwa ini tidak adanya stabilitas politik dalam negeri dan berakhirnya Sukarno dari jabatan kepresidenan.

2. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, karangan Nazaruddin Sjamsuddin (ed), Tahun 1988, buku ini berisi tentang lahirnya Demokrasi Terpimpin sesuai dengan jiwa-jiwa bangsa Indonesia, karena sebelum Demokrasi Terpimpin yang berlaku Demokrasi Parlementer. Demokrasi Parlementer tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, dimana Demokrasi Parlementer adalah demokrasi import dari barat. Selain itu buku ini juga membahas tentang pemikiran Sukarno sebelum kemerdekaan dimana yang dikembangkan olehnya adalah Nasionalisme yang mencerminkan anti terhadap kolonialisme dan imperialisme dan pemikiran Sukarno setelah kemerdekaan dimana Sukarno berpegang pada prinsip-prinsip dasar nasionalisme.
3. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, karangan Bernhard Dahm, Tahun 1987, buku ini berisi tentang pembentukan kabinet baru yang tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen pada tahun 1959. Sukarno kemudian mengangkat dewan pusat sebuah front nasional untuk

mencakup golongan-golongan Nasionalis, Agama dan Komunis yang diberi nama NASAKOM. Dengan menggunakan pergerakan-pergerakan politik yang sama seperti ia memulai perjuangannya untuk kemerdekaan, setelah kembali berkuasa berusaha melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang adil.

4. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, karangan Miriam Budiardjo, Tahun 1986, buku ini berisi tentang beberapa konsep mengenai demokrasi seperti Demokrasi Konstitusional, ciri khas dari Demokrasi ini adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945 yang berarti menegakkan kembali azas-azas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga Negara, hak-hak asasi manusia dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan. Sedangkan demokrasi terpimpin cirinya ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

5. *Politik Luar Negeri Indonesia*, karangan Michael Leifer, Tahun 1986, buku ini berisi tentang pengenalan Demokrasi Terpimpin menyerap sebagian besar daya politik, sehingga Sukarno dapat memberikan perhatian yang serius atas Irian Barat setelah ia mengadakan konsolidasi atas kedudukan domestik pada pertengahan tahun 1960. Untuk memulihkan kembali wilayah tersebut dengan menggunakan diplomasi. Dalam kasus mengenai Irian Barat merupakan faktor penentu yang sama atas kepentingan politik dan penunjang dalam menyokong sistem Demokrasi Terpimpin.
6. *Indonesia Abad ke-20 jilid II*, karangan G. Moedjanto, Tahun 1988, buku ini berisi tentang usaha kembali ke UUD 1945 kepresiden Sukarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959, dimana Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 yang kini berlaku kembali Presiden Sukarno langsung memimpin pemerintahan dan membentuk kabinet kerja yang menteri-menterinya tidak terikat pada partai. Program itu kemudian diuraikan oleh presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Uraian ini akan ditetapkan menjadi GBHN oleh MPRS yang dikenal sebagai Manifesto Politik yang berintikan USDEK.
7. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, karangan Moh. Mahfud, Tahun 1993, buku ini berisi tentang gagasan Sukarno mengenai Demokrasi Terpimpin yang memancing lahirnya pro dan kontra atau pendapat yang



kontroversial. Pengertian agak rinci mengenai Demokrasi Terpimpin dapat ditemukan dalam pidato Sukarno dalam rangka HUT RI tahun 1957 dan 1958. Pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, Sukarno menjelaskan lagi butir-butir pengertian Demokrasi Terpimpin.

8. *Soekarno Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, karangan Feith, Herbert, Tahun 1995, buku ini membahas tentang *power politics* dalam masa awal Demokrasi Terpimpin. Kabinet kerja terbentuk dalam tempo satu minggu setelah Dekrit 5 Juli 1959. Kabinet ini secara eksplisit sifatnya non partai, dimana anggota-anggota partai yang duduk di dalamnya diharuskan keluar dari partai. Program Kabinet pertama untuk periode Demokrasi Terpimpin diumumkan Sukarno pada tanggal 17 Agustus yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang nantinya diterima sebagai Manifesto Politik (Manipol/Usdek) dari Demokrasi Terpimpin.

#### F. Kajian Teori

Dalam membahas permasalahan yang ada maka perlu diketahui mengenai definisi atau arti dari judul skripsi ini. Pengertian atau definisi dari judul skripsi ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap skripsi ini lebih mudah dilakukan. Skripsi ini berjudul "Politik Demokrasi Terpimpin 1959-1966".

Menurut Abraham Lincoln demokrasi berasal dari Yunani. Terdiri dari dua suku kata yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan "Kratos" yang berarti

Pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Arti dari Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara teknis pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selain itu pengertian demokrasi banyak dikenal dewasa ini, seperti Demokrasi Liberal, Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Komunis dan Demokrasi Pancasila. Arti dari demokrasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi Liberal

Demokrasi ini berdasarkan pada prinsip kebebasan, kehidupan politik bangsa dan negara mengalami suasana kebebasan yang tidak terbatas. Hal ini mencerminkan tingkah laku politik yang cenderung anarkis yaitu ingin selalu benar dan menang sendiri. Suasana liberalisme yang nyaris anarkis merangsang pertentangan ideologi dan politik yang tajam. Pada demokrasi ini pemerintah tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya, kecuali menyangkut kepentingan umum.<sup>12</sup> Jadi Demokrasi Liberal warga negara diberikan kebebasan dalam bertindak dan mengambil keputusan, asalkan dalam keputusan itu tidak merugikan pihak lain. Selain itu negara tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya.

2. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi ini ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

---

<sup>12</sup> Moh Mahfud: 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 43.

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam Konstitusi, maka sering disebut sebagai Pemerintahan Konstitusi. Jadi pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya, serta hak-hak asasi warga negaranya secara tegas dijamin.<sup>13</sup>

Demokrasi Konstitusional ini mengambil alternatif dalam mengkombinasikan prinsip kedaulatan rakyat dan pemusatan atas legalitas. Kabinet-kabinet bertanggung jawab kepada parlemen mengenai tindakan politik. Adanya pembatasan kekuasaan menghindari kesewenang-wenangan pemerintah.

### 3. Demokrasi Komunis

Hukum dialektika menjadi dasar dari demokrasi sampai terbentuknya satu negara komunis. pengertian hukum dialektika adalah pertentangan-pertentangan pada lapisan bawah akan senantiasa bergerak, dari pergolakan itu akan menggerakkan lapisan di atasnya, sehingga terbentuklah satu kekuatan mayoritas, satu partai saja yang dikenal dengan diktatur proletariat.<sup>14</sup> Adanya suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis berperan sebagai penguasa. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berserikat bagi warga negara, karena segala sesuatu telah diatur secara sentral dari pusat.<sup>15</sup> Jadi Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang dikuasai oleh satu partai, sedangkan golongan-golongan lainnya di singkirkan secara paksa.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo: 1986, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hlm. 52.

<sup>14</sup> William Ebenstein: 1963, *Isme-isme Dewasa ini*, Penerbit Swada, hlm. 12.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 90.



#### 4. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama dan keyakinan agama masing-masing. Harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, menjamin dan mempersatukan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial.<sup>16</sup> Jadi penerapan Demokrasi Pancasila sesuai dengan sila-sila pancasila, dimana pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia.

#### G. Hipotesis

Yang dimaksud hipotesis adalah jawaban sementara terhadap satu masalah penelitian. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman bagi penelitian. Itu berarti sebelum penelitian dilakukan sudah dirumuskan hipotesis dari masalah yang akan diteliti. Hipotesis itulah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Dengan adanya hipotesis, maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Oleh karena seringnya terjadi pergantian Kabinet maka terbentuklah Demokrasi Terpimpin.

---

<sup>16</sup> Moh Mahfud, *op. cit.*, hlm. 43.

2. Karena adanya konsepsi yang diusulkan oleh Sukarno maka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dapat berjalan.
3. Berhasil karena Sukarno menciptakan satu lawan yaitu Belanda di Irian Barat sehingga Sukarno berhasil menciptakan persatuan, kebersamaan untuk melawan Belanda. Gagal karena terjadi perpecahan antara PKI dan TNI-AD.

#### H. Metodologi Penulisan

Dalam mengkaji tentang politik Demokrasi Terpimpin 1959-1966 sebuah tinjauan tentang perspektif historis politis, digunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau secara *imaginative* dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi.<sup>17</sup> Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah tersebut antara lain:

##### 1. Heuristik

Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti.<sup>18</sup> Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat di perpustakaan Sanata Dharma dan perpustakaan Ignatius, yang berupa buku pustaka, majalah, dokumen dan publikasi. Baik yang berupa primer maupun sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari para saksi mata atau pelaku peristiwa itu sendiri yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu terjadi atau berupa dokumen

<sup>17</sup> Louis gottschalk, 1975, *Mengerti Sejarah Pengantar Ilmu Sejarah (terjemahan)*, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Hlm. 32.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 33.

resmi dan penting pada masa peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata atau hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi.<sup>19</sup>

Adapun Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

*Sukarno Sebuah Biografi Politik*, karangan Legge, J, D, *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek* karangan Nazaruddin Sjamsuddin dan *Dasar-dasar Ilmu Politik* karangan Miriam Budiardjo.

## 2. Kritik sumber

Kritik sumber adalah pengujian dari sumber-sumber sejarah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (bisa dipercaya) sumber tersebut.<sup>20</sup> Kritik sumber merupakan uji data pada penelitian sejarah yang terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya. Sedangkan kritik ekstern dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, jenis huruf yang digunakan untuk membuktikan keasliannya. Hasil dari kritik sumber berupa fakta-fakta yang merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

## 3. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan menganalisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam penulisan suatu sejarah, selalu ada yang dipengaruhi jiwa jaman,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>20</sup> Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, hlm. 99-100.

kebudayaan pendidikan, lingkungan sosial dan yang melingkupi penulisnya.<sup>21</sup> Untuk itu analisis sumber ini dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya antara satu dengan yang lainnya.

#### 4. Historiografi

Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah yang utuh. Dalam penelitian ini akan disajikan model penulisan deskriptif-analitis.<sup>22</sup> Tulisan ini menggambarkan dan melukiskan perjuangan Soekarno dalam politik Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966. Sebuah tinjauan dalam perspektif historis-politis.

#### I. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang Demokrasi Terpimpin 1959-1966 (Tinjauan dari Segi Politik), dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik demokrasi terpimpin. Bab ini berisi tentang faktor politik, ekonomi dan sosial lahirnya Demoksasi Terpimpin

---

<sup>21</sup> Sartono Kartodirjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 72.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 60-61.

Bab III : Pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin. Dalam proses tersebut akan dibahas kebijakan politik Sukarno berupa konsep politik Sukarno, pelaksanaan, reaksi TNI-AD dan PKI, kelompok yang menentang politik Demokrasi Terpimpin.

Bab IV: Keberhasilan dan kegagalan politik Demokrasi Terpimpin. Keberhasilan membebaskan Irian Barat yang dibahas faktor pendorong keberhasilan dan sumbagan terhadap negara, Sedangkan kegagalan terjadi pemberontakan G. S membahas tentang faktor yang menyebabkan kegagalan dan dampak bagi negara.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab II, III, IV. dari uraian diatas dapat diamati bahwa melalui penelitian ini, penulis ingin membuat suatu tulisan tentang lahirnya, pelaksanaan, keberhasilan dan kegagalan demokrasi terpimpin. Uraian dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bab-bab.



**BAB II**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI LAHIRNYA  
POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN**

Setelah Indonesia merdeka masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia cukup banyak seperti menciptakan suatu tata sosial politik yang baru sebagai jaminan keamanan, kestabilan politik, membina persatuan dan kesatuan bangsa, melakukan pengembangan kepribadian berdasarkan pancasila, membangun prestise nasional. Dalam rangka membina kehidupan antar bangsa, membangun sistem ekonomi yang akan mencapai kondisi yang lebih makmur, peningkatan kesejahteraan terhadap rakyat, menciptakan keadilan sosial mencapai kesatuan ekonomi nasional. Masalah-masalah yang akan dicapai dan dihadapi oleh bangsa Indonesia sangat berkaitan erat dengan cita-cita untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.<sup>23</sup> Berdasarkan dari penjelasan diatas demokrasi terpimpin lahir berdasarkan faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan lahirnya demokrasi terpimpin dari faktor-faktor tersebut.

**A. Faktor Politik**

Setelah Indonesia merdeka undang-undang yang digunakan yaitu UUD 1945, Sukarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Maka sebagai presiden Sukarno memiliki kekuasaan yang besar. Akan tetapi pada

---

<sup>23</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 223.

tanggal 14 November terjadi perubahan sistem pemerintahan, dari sistem presidensial keparlementer walaupun pada saat itu UUD 1945 tetap berlaku. Dengan perubahan ini kedudukan Sukarno hanya berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Kabinet.<sup>24</sup>

Pengalihan sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer bertentangan dengan institusi yang ada. Namun pada tahun 1949 berlaku UUD RIS, hanya dalam waktu 6 minggu RIS tidak dapat diganggu gugat. Tetapi sesudah itu banyak yang menghendaki untuk kembali ke NKRI. Kembalinya RIS ke NKRI sebagai suatu hal yang wajar dan sehat, jika RIS dibiarkan hidup terus secara politis dan sosial psikologis bisa menyebabkan keadaan yang tidak sehat. Dengan terbentuknya NKRI maka terwujudlah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu mendirikan negara kesatuan. Perubahan konstitusi RIS dilakukan dengan menetapkan undang-undang perubahan konstitusi RIS, yaitu UU no 7/1950 dari RIS. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa konstitusi sementara RIS diubah menjadi UUD Sementara RI. UUDS 1950 disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.<sup>25</sup>

Sistem pemerintahan UUDS 1950 adalah sistem Kabinet Parlementer, maksudnya sistem Kabinet yang berkuasa harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Bila mayoritas dalam parlemen tidak mendukung Kabinet maka Kabinet harus mengembalikan mandat kepada Presiden dan

<sup>24</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op cit*, hlm. 14.

<sup>25</sup> Moedjanto, *op. cit*, hlm. 73-74.



untuk kemudian membentuk Kabinet baru. Presiden hanya merupakan Kepala Negara, tidak mengepalai dan tidak bertanggung jawab atas pemerintahan.

Pada masa Demokrasi Parlementer politik Indonesia belum mencapai stabilitas yang kuat. Setiap saat Kabinet yang ada harus diganti sebelum dapat menyelesaikan program kerja Kabinet tersebut. Hal ini berdampak memacetkan pembangunan karena sering terjadi pergantian program pemerintahan dan menyebabkan Indonesia terpecah belah. Dengan masyarakat yang terpecah belah sulit untuk membangun dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Demokrasi Liberal telah mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia. Sebagai akibat dari wewenang besar dari DPR, maka pemerintah di Indonesia tidak pernah bertahan lama. Pemerintah yang satu berdiri untuk dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu oleh parlemen, yang kemudian membentuk pemerintahan baru untuk dijatuhkan lagi oleh kekuatan lawannya dalam Parlemen.<sup>26</sup> Perwakilan rakyat dalam parlemen terwujud melalui partai politik, pada waktu itu partai politik mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Sehingga partai politik dapat berkembang dan berpengaruh bagi bangsa Indonesia.

Selain itu Demokrasi Parlementer menutup kemungkinan adanya partisipasi politik dan menyebabkan politik di Indonesia tidak stabil karena adanya perebutan kekuasaan dan perselisihan diantara para tokoh politik. Untuk memperbaiki situasi politik yang tidak stabil maka Sukarno menentang

---

<sup>26</sup> Sayidiman Suryohadiprojo: 1986, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, Jakarta, UI, hlm. 72.



sistem ini karena tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, dimana sistem Parlemerter berasal dari negeri Belanda. Presiden Sukarno mengusulkan untuk mengganti Demokrasi Parlemerter dengan demokrasi lain yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

Suasana politik yang tidak stabil akan membawa negara pada perpecahan nasional maka untuk mengatasinya Sukarno mengeluarkan gagasan yang disebut konsepsi Presiden dalam suatu pidato tertanggal 21 Februari 1957 dengan judul "Menyelamatkan Republik Proklamasi".<sup>27</sup> Menurut konsepsi ini sesuai dengan budaya Indonesia.

Ketika konsepsi ini diutarakan oleh Sukarno pada bulan Februari 1959 pemerintah mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945, tetapi sidang konstituante tidak mau memberikan dua per tiga suaranya untuk mendukung usulan tersebut. Namun Sukarno tetap menyampaikan konsepsi tersebut. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Sukarno menyampaikan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.

Kemudian Demokrasi Parlemerter diganti dengan Demokrasi Terpimpin yang mulai diterapkan pada tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi segala bidang kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial. Dengan adanya Demokrasi Terpimpin dapat memulihkan situasi politik yang kacau dan roda pemerintahan dapat berjalan lancar.

---

<sup>27</sup> Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit*, hlm. 79.

Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi krisis dalam berbagai pertentangan. Pertentangan antar partai yang menyebabkan ketidak stabilan politik, persaingan antar golongan dan individu untuk merebut keuntungan materi yang menyebabkan krisis ekonomi dan sikap yang tidak menghormati norma-norma yang menyebabkan terjadinya krisis sosial. Langkah-langkah Presiden Sukarno untuk memperkuat MANIPOL-USDEK yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu untuk memperbaiki stabilitas nasional menjadi lebih baik.

Namun penerapan Demokrasi Terpimpin tidak berjalan mulus. Keberadaan partai politik mulai dipersempit, partai-partai politik yang sebelumnya menjadi pusat pengaruh yang kuat dalam pembangunan, sekarang tidak mempunyai suara lagi. Selain itu kegiatan politik masih boleh berjalan sesuai dengan Manifesto Politik (Manipol). Apabila dalam pelaksanaan partai politik melanggar ketentuan, maka Presiden akan mencabut pengakuan partai tersebut dan menon-aktifkan kegiatan partai.

Sedangkan kehidupan politik lebih diarahkan ke pemerintahan, partai politik tidak lagi memutuskan persoalan legislatif dan eksekutif. Yang memutuskan persoalan legislatif dan eksekutif adalah pemerintah.<sup>28</sup> Dipersempitnya pengaruh partai politik bertujuan agar pemerintah dapat mengontrol pembangunan sehingga hasilnya akan lebih baik.

---

<sup>28</sup> Herbert Feith dan Lance Castles, *op.cit*, hlm. 112.

## B. Faktor Ekonomi

Pada tahun 1957-1959 ada dua peristiwa politik yang ikut meruncingkan krisis ekonomi. Kedua peristiwa ini ikut andil dalam proses lahirnya konsep ekonomi terpimpin dan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Peristiwa pertama adalah satu konflik dengan negara Belanda mengenai Irian Barat yang antara lain berakibat pada nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Yang kedua gerakan kedaerahan yang menentang pemerintahan pusat di Jakarta. Peristiwa itu mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan krisis ekonomi.<sup>29</sup>

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi: peristiwa pertama keberhasilan Jakarta dalam menindas gerakan kedaerahan yang menentang pemerintah pusat di Jakarta dan mencapai puncaknya dalam PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Keberhasilan menindas pemberontakan tersebut memperkuat kedudukan presiden dan Angkatan Darat dalam kekuatan sosial politik yang sangat menentukan nasib negara dan bangsa. Peristiwa kedua konflik tentang Irian Barat, kemudian konflik itu berbuntut pada pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Pemerintah melalui Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda akan dikembalikan begitu Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.<sup>30</sup>

Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bidang sosial-ekonomi-politik merupakan kondisi awal untuk melaksanakan demokrasi terpimpin.

<sup>29</sup> Muhaimin Yahya :1991, *Busines dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, hlm. 40.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 97.

Yang kemudian Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini berfungsi untuk memperbaiki kehidupan politik, sosial dan ekonomi Indonesia.

Setelah Kabinet Djuanda mengundurkan diri lalu dibentuklah kabinet kerja pertama, Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Program kerja yang utama yaitu pemenuhan sandang pangan dan pemerintah bertekad untuk memperbaiki standar kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Sukarno mengumumkan Manifesto Politik atau Manipol yang berintikan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Kelahiran Manipol-USdek dapat disebut sebagai awal dari kelahiran dan pelaksanaan konsep Ekonomi Terpimpin pada periode Demokrasi Terpimpin. Menurut Sukarno dengan adanya Ekonomi Terpimpin proses kemiskinan masyarakat dapat dihentikan, krisis ekonomi dapat diperbaiki dan pemberdayaan kehidupan masyarakat dapat dicapai. Sehingga cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai.

Dalam UUD 1945 pasal 33 terdapat beberapa peraturan tentang pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Pada pasal 33 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Pasal 33 ini merupakan sendi utama politik perekonomian dan politik sosial RI.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mohamad Hatta: 1960, *Ekonomi Terpimpin*, Penerbit Djakarta (Ejaan Disempurnakan), hlm. 45.



Menurut Presiden Sukarno Ekonomi Terpimpin merupakan bagian yang integral dari sistem Demokrasi Terpimpin. Ekonomi Terpimpin mengutamakan peranan “Perencanaan Semesta” dan pentingnya suatu *blue-print ekonomi*. Selain itu Ekonomi Terpimpin merupakan sebuah sistem yang berfungsi sebagai sendi dari pada kehidupan dan kesejahteraan nasional.<sup>32</sup>

Tujuan Ekonomi Terpimpin dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yaitu untuk menciptakan suatu masyarakat yang bebas dari sisa-sisa feodalisme. Dalam amanat pembangunan di depan sidang pleno Depernas tanggal 28 Agustus 1959, Presiden Sukarno mengatakan:

“Ekonomi sebagai sendi daripada kehidupan dan kesejahteraan nasional, haruslah dapat dilaksanakan sebagai dasar dari pada pembangunan keseluruhan. Sistem ekonomi itu adalah Ekonomi Terpimpin dan untuk melaksanakannya diperlukan suatu kebijaksanaan dalam sistem pemerintahan yang membuka pintu seluas-luasnya bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Dasar Demokrasi Terpimpin telah dijamin dan tersusun pada garis-garis besar dalam UUD 1945 yang kini berlaku lagi.”<sup>33</sup>

Melalui pernyataan diatas, Presiden Sukarno menandakan bahwa Ekonomi Terpimpin adalah ekonomi yang dipimpin oleh pemerintah (sesuai dengan Pancasila). Pemerintah lalu menyusun strategi pembangunan yang tercermin dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang diumumkan pada 28 Maret 1963. Strategi ini hendak diikuti untuk mensukseskan pembangunan semesta berencana delapan tahun yang polanya telah diserahkan oleh Depernas pada

---

<sup>32</sup> Deppen RI: 1959, *Amanat Pembangunan Nasional Pada Sidang Pleno Depernas Tentang PNSB Tanggal 28 Agustus 1959*, Jakarta, Deppen RI (EYD), hlm. 74. Lihat juga Herbert Feith, *Sukarno Militer*, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>33</sup> Deppen RI, *op.cit.*, hlm. 74.

13 Agustus 1960 dan disetujui oleh Presiden. Inti pokok Dekon ini mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi dibagi dalam jangka pendek (sandang pangan) dan jangka panjang (industrialisasi).<sup>34</sup> Dengan adanya ekonomi terpimpin dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan krisis ekonomi yang terjadi dapat diperbaiki.

### C. Faktor Sosial

Keadaan sosial yang tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena seringnya terjadi pertentangan dan perebutan kekuasaan diantara para pembesar membawa Indonesia pada keadaan krisis sosial. Selain itu konflik yang ada antara satu kekuatan dengan kekuatan lain telah mendorong anggota-anggota parlemen untuk melibatkan rakyat kedalam konflik tersebut. Akibatnya konflik politik menyebar luas kedalam masyarakat sehingga menghantam sendi-sendi demokrasi yang justru ingin ditumbuhkan.<sup>35</sup>

Karena terjadi pertentangan dan perebutan kekuasaan diantara para pembesar menyebabkan krisis kewibawaan. Krisis kewibawaan ini telah menjadi semacam malapetaka, penyakit dengan gejala bahwa masyarakat tidak lagi menghormati kekuasaan. Menurut pengamatan Sukarno Indonesia menghadapi 5 macam krisis yaitu: pertama krisis politik dimana banyak orang dalam masyarakat tidak lagi percaya pada demokrasi. Kedua adanya krisis dalam aparatur negara yang berkaitan dengan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Ketiga krisis dalam cara berpikir dan menganalisa.

---

<sup>34</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 118.

<sup>35</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 18-19.



Keempat krisis moral dan yang kelima krisis kewibawaan.<sup>36</sup> Krisis yang terjadi tersebut akan membawa bangsa Indonesia pada perpecahan dan pertentangan. Untuk memperbaiki krisis sosial yang terjadi maka Sukarno mengajak seluruh masyarakat untuk memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh bangsa Indonesia dan krisis sosial tidak terjadi sehingga antara penguasa dan masyarakat dapat saling bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia. Faktor sosial yang terjadi melatar belakangi lahirnya Demokrasi Terpimpin. Dengan lahirnya Demokrasi Terpimpin krisis sosial yang terjadi dapat terselesaikan sehingga dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 19.

**BAB III**

**TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN**

**A. Konsep Politik Sukarno pada Masa Demokrasi Terpimpin**

Situasi politik yang tidak stabil pada masa Demokrasi Konstitusional, berpengaruh pada seringnya terjadi pergantian Kabinet dengan program pemerintah yang berbeda-beda. Ketidakstabilan politik yang terjadi menyebabkan Demokrasi Konstitusional runtuh. Sebagai pengganti Demokrasi Konstitusional Sukarno memilih Demokrasi Terpimpin. Munculnya gagasan tentang Demokrasi Terpimpin berawal dari keprihatinannya terhadap seringnya terjadi pergantian Kabinet tanpa bisa menyelesaikan program kerjanya. Hal ini merupakan penghalang pembagian serta melemahnya pengaruh dan kewibawaan partai dan parlemen, maka dengan demikian muncul gagasan Demokrasi Terpimpin.

Sukarno mengutarakan ide Demokrasi Terpimpin karena menurutnya Demokrasi Terpimpin sangat cocok bagi rakyat Indonesia. Gagasan Demokrasi Terpimpin banyak didominasi oleh kepribadian Sukarno, walaupun prakarsa untuk pelaksanaannya diambil bersama dengan pimpinan angkatan bersenjata. Sebagai titik tolak dari Demokrasi Terpimpin yaitu dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sesuai dengan sifat dan jiwa bangsa Indonesia.

Dalam penerapan Demokrasi Terpimpin, Sukarno tidak menghendaki adanya peniruan bentuk konstruksi politik dari negara lain terutama negara

Barat. Karena dalam Demokrasi Terpimpin untuk mengambil suatu keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat sehingga hak minoritas tidak terabaikan. Demokrasi Terpimpin dianggap demokrasi yang sangat cocok bagi Bangsa Indonesia.

Langkah-langkah untuk melaksanakan gagasan Demokrasi Terpimpin adalah dengan dikeluarkannya konsepsi Presiden. Konsepsi politik yang diajukan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 21 Februari 1957 ada dua usulan. Konsepsi yang pertama Sukarno menyarankan dibentuknya Kabinet Gotong Royong yang mewakili semua partai politik. Partai politik yang dimaksud ada empat yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI yang merupakan pemenang pemilu tahun 1955. Dengan demikian pemerintah dijalankan oleh empat partai yang akan dibantu partai-partai kecil lainnya. Gotong royong yang diterapkan oleh Sukarno akan lebih mampu menjalankan kebijaksanaan politik nasional yang dapat diterima dan meningkatkan kerukunan Persatuan Nasional. Karena gotong royong menggambarkan jiwa asli Indonesia dan mempengaruhi seluk beluk bangsa Indonesia.<sup>37</sup>

Konsepsi yang kedua adalah Sukarno mengusulkan pembentukan suatu Dewan Nasional dibawah kepemimpinannya yang dapat memusyawarahkan politik nasional. Dengan pembentukan suatu Dewan Nasional dibawah pimpinan Sukarno yang akan memusyawarahkan garis-garis besar politik Nasional. Dewan Nasional ini bukan suatu badan perwakilan partai-partai, melainkan perwakilan golongan-golongan fungsional

---

<sup>37</sup> Dahm, Bernhard, *op.cit.* hlm. 56, lihat juga Nazaruddin Sjamsuddin, hlm. 176.

oleh Suakrno adalah golongan karyawan yang terdiri dari wakil-wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, golongan agama, angkatan bersenjata, pemuda, wanita dan juga wakil-wakil daerah.<sup>38</sup>

Menurut Sukarno Dewan Nasional ini merupakan pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan. Fungsi Dewan Nasional ini adalah memberi nasehat kepada Kabinet, baik diminta pendapatnya atau tidak. Dewan ini merupakan pencerminan dari masyarakat sedangkan Kabinet merupakan cerminan dari Parleментар.

Dengan memasukkan unsur-unsur utama dari masyarakat bangsa, maka kedua hal tersebut (Pemerintah dan Dewan Nasional) akan dapat mengambil keputusan yang bukan didasarkan kepada penjejalan minoritas oleh mayoritas tetapi didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Pandangan politik Sukarno mengusulkan untuk memperjuangkan persatuan yang memungkinkan terjalinnya kerukunan antara aliran-aliran politik yang saling berlawanan dengan cara berpikir bagi keutuhan rakyat Indonesia.<sup>39</sup>Dengan demikian bentuk tersebut akan mendapatkan dukungan dari seluruh Bangsa Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka UUD 1945 berlaku kembali dan dijadikan konstitusi Republik Indonesia(lihat lampiran II, Presiden Sukarno sedang membacakan Dekrit Presiden, hlm. 79). Sukarno sebagai Presiden langsung memimpin pemerintahan berdasarkan UUD 1945, maka Presiden tidak hanya sebagai kepala Negara melainkan sebagai kepala

<sup>38</sup> Legge, John, D: 1985, *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 326, lihat juga Nazaruddin Sjamsudin, *op.cit*, hlm. 177.

<sup>39</sup> Dahm, Bernhard, *op.cit*, hlm. 56.

Pemerintahan. Hal ini merupakan langkah awal dari pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

### **B. Pelaksanaan Politik Demokrasi Terpimpin**

Presiden Sukarno menyampaikan Dekrit Presiden kepada seluruh rakyat pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden maka UUD 1945 berlaku kembali dan Demokrasi Terpimpin mulai diterapkan( lihat lampiran III Dekrit Presiden RI, hlm. 80). Pada pidato peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” Sukarno menjelaskan kembali butir-butir pengertian Demokrasi Terpimpin sebagai berikut: a).Tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum masyarakat dan negara. b).Tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat bangsa dan negara<sup>40</sup> kemudian lebih dikenal dengan Manipol Usdek, berisikan tiga kerangka revolusi dan lima persoalan pokok revolusi Indonesia yang dijadikan sebagai acuan bagi garis besar politik. Melengkapi manipol usdek, selanjutnya presiden Sukarno mengajukan pula konsepsi RIL (Revolusi, Ideology dan leadership) yang diterjemahkan sebagai revolusi-sosialisme-pimpinan (Resopim).<sup>41</sup> Pengaruh sosialisasi politik melalui Soekarnoisme ini mempunyai pengaruh kuat terhadap pembuatan kebijaksanaan politik Luar negeri. Hal ini menjadi wadah menyalur kepentingan ideologi yang

---

<sup>40</sup> Moh. Mahfud, *op.cit*, hlm.57.

<sup>41</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 118.



diperjuangkan melalui revolusi dibawah satu pimpinan nasional yaitu Sukarno.

Tanggal 5 Maret 1960 Presiden Sukarno membekukan Parlemen (DPRS) karena persoalan anggaran belanja negara yang diajukan Presiden tidak diterima oleh Parlemen. Presiden akan membentuk DPRS baru yang sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan setengah dari anggota terdiri dari golongan fungsionalnya yang diberi nama DPR Gotong Royong. DPR GR ini berbeda dengan badan-badan legislative sebelumnya. DPR GR berada dalam situasi dimana peranan eksekutif sangat kuat sehingga yang di tonjolkan dari DPR GR adalah pembantu pemerintah. Perubahan fungsi ini tercantum pula dalam peraturan tata tertib DPR GR yang tidak menyebutkan hak kontrol yang seharusnya dimiliki lembaga legislatif seperti hak interperlasi, *anquetle* dan budget dihapus. Keinginan Presiden ini ditentang oleh partai Masyumi, PSI, partai Katolik dan IPKI dengan membentuk organisasi yang disebut Liga Demokrasi yang mendapat dukungan dari TNI-AD. Kemudian Liga Demokrasi mendapat dukungan dari tokoh PNI, NU. Tujuan didirikannya liga demokrasi ini untuk menentang pembentukan Parlemen gotong royong dan menghadapi bahaya pengaruh komunis.<sup>42</sup> Setelah Sukarno mengetahui keikutsertaan TNI-AD dalam Liga Demokrasi maka Sukarno bertindak agar TNI-AD melepaskan diri dari Liga Demokrasi. Dan akhirnya keberadaan Liga Demokrasi dilarang pada tanggal 27 Februari 1961.

---

<sup>42</sup> Jahja Muhaimin: 1971, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, seri penerbit Skripsi Terbaik, hlm. 109-110.



Pada tanggal 27 Maret 1960 keluarlah pengumuman mengenai pembentukan sebuah Parlemen gotong royong-DPR GR, sebagai badan penasehat bagi pemerintah yang mewakili semua masyarakat. Pada tanggal 15 Agustus pembentukan MPRS sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi akan bersidang setiap tiga tahun sekali. Dalam waktu yang bersamaan diangkat juga dewan pusat sebuah front nasional yang mencakup golongan-golongan Nasionalis, Agama dan Komunis atau yang lebih dikenal dengan Nasakom. Nama NASAKOM ini merupakan singkatan nama dari ketiga golongan yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis.<sup>43</sup>

Yang dimaksud dengan NASAKOM adalah lembaga-lembaga pemersatu atas pencerminan golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia. Nasakom merupakan jiwa dari kepribadian masyarakat yang berisi tiga kekuatan yang meliputi: Nas adalah golongan nasionalis, A adalah golongan agama dan Kom adalah golongan yang beraliran komunis.<sup>44</sup> Doktrin Nasakom tersebut yang mengandung nasionalis, agama dan komunis akan bersama-sama berperan dalam pemerintahan nasional Sukarno sehingga akan menghasilkan suatu sistem politik yang kuat dan menciptakan kepribadian nasional.

Sukarno mencoba untuk merealisasikan Nasakom dengan mempergunakan tiga kekuatan politik. Ketiga kekuatan politik ini adalah Nasionalis diwakili oleh PNI, agama diwakili oleh NU dan Komunis diwakili oleh PKI. Sedangkan partai-partai kecil yang lain bergabung kepartai yang

<sup>43</sup> Dahm, Bernhard, *op.cit*, hlm. 406-407.

<sup>44</sup> Adams, Cindy: 1966, *Bung Karno penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 433.

sesuai dengan alirannya. Seperti partai yang beraliran nasionalis bergabung dengan PNI, partai yang beraliran agama bergabung dengan NU dan partai yang beraliran komunis bergabung dengan PKI. Namun partai politik yang dipilih tidak dapat menghasilkan suatu sistem politik yang kuat, menyebabkan meluasnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.

Pada bulan Juni 1960 Sukarno berhasil menyusun Parlemen yang disebut DPR Gotong Royong. DPR GR didirikan dengan penetapan Presiden No.4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No.3 Tahun 1960.<sup>45</sup> DPR GR ini terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional, yaitu wakil-wakil Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi dalam wakil-wakil golongan fungsional yang berada dibawah arus politiknya serta PKI yang paling banyak mendapatkan kursi di DPR GR. Semua anggota yang duduk di DPR GR merupakan pilihan/ditunjuk oleh Sukarno. Setelah Sukarno berhasil membentuk DPR GR, Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah peraturan tentang penyederhanaan kepartaian. Peraturan yang dikeluarkan oleh Sukarno ini diikuti dengan dibubarkannya PSI dan Masyumi, karena partai ini menurutnya sudah tidak memenuhi persyaratan lagi. Pada saat itu partai yang dapat hidup dengan resmi oleh pemerintah yaitu: PNI, NU, PKI, PSII, PERTI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Parti Indonesia / Partindo dan Partai IPKI.<sup>46</sup> Dari partai-partai yang ada PKI mendapatkan perlakuan sangat istimewa dari

---

<sup>45</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 193

<sup>46</sup> Jahja Muhaimin, *op.cit*, hlm. 110.

Sukarno, sehingga memungkinkan bagi PKI untuk dapat melebarkan sayapnya dalam politik Indonesia.

Ulang tahun Proklamasi tahun 1960 merupakan tonggak perkembangan demokrasi, dalam pidato kenegaraan yang berjudul Djalannya Revolusi Kita (Djarek). Presiden Sukarno mengemukakan perlunya dibentuk Dewan Pertimbangan Agung, Badan Perancang Nasional, Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Front Nasional. Dari lembaga-lembaga yang dibentuk ini hanya DPR dan MPR yang bersifat konsitusional karena terdapat dalam UUD 1945. Badan Perancang Nasional dan Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara hanya sebagai symbol keinginan pemerintah untuk menertibkan aparat administrasi Negara dan keinginan untuk membangun. Sedangkan Front Nasional yang didirikan pada tahun 1961 berfungsi sebagai lembaga yang bertugas menggalang rakyat untuk membantu pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.<sup>47</sup>

Pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1960 dikenal sebagai Manifesto Politik, kemudian oleh MPR diangkat menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dalam bidang konstitusional, hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan ada pada rakyat yang dijalankan oleh MPR. Kenyataannya MPR harus menyesuaikan diri dengan keinginan Sukarno dan mengikuti perintah dari Sukarno. Dalam keadaan seperti ini

---

<sup>47</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 200.

kedudukan DPR GR dan MPRS merupakan stempel legitimasi dari pemikiran gagasan dan keinginan Sukarno.

Sukarno menjadikan dirinya sebagai pengambil inisiatif dalam membangun struktur politik yang disesuaikan. Dengan kepentingan-kepentingan didalam menjalankan pemerintahan, permusyawaratan dan alat kontrol. Keadaan seperti ini terjadi dikarenakan tidak berfungsinya DPR GR sebagai Badan yang mengawasi tingkah laku pemerintah. Selain itu MPRS yang anggotanya diangkat oleh presiden harus patuh pada presiden.<sup>48</sup>

HUT RI pada tanggal 17 Agustus 1961 berjudul Revolusi, Sosialisme Ala Indonesia Pimpinan Nasional(Resopim), selain itu Presiden Sukarno menegaskan bahwa tahun 1961 merupakan tahun yang akan menentukan Indonesia berhasil atau tidak dalam merebut Irian Barat. Presiden Sukarno berusaha untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan TNI-AD dan partai dan atas dukungan seluruh rakyat Indonesia yang akan digunakan untuk melawan Belanda di Irian Barat.

Pada tahun 1962 perjuangan dalam pembebasan Irian Barat, pemulihan keamanan dan ketertiban telah berhasil dilaksanakan. Perjuangan pembebasan Irian Barat berhasil dilakukan sehingga memaksa pihak Belanda untuk menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada RI dalam perjanjian New York 15 Agustus 1962. keberhasilan itu dituangkan dalam pidato memperingati HUT RI pada 17 Agustus 1962 berjudul Tahun Kemenangan. Setelah kemenangan dapat diraih diharapkan kemenangan-kemenangan lain

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 201-202.



akan menyusul seperti kemenangan ekonomi dan kemenangan dalam memerangi kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kesukaran ekonomi pemerintah lalu menyusun strategi pembangunan yang tercermin dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dimana isi pokok dari Dekon yaitu mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi dibagi dalam jangka pendek (sandang pangan) dan jangka panjang (industrialisasi). Dalam pembangunan Indonesia harus berjuang sendiri tanpa menggantungkan diri pada bantuan asing.<sup>49</sup>

Pada tanggal 1 Mei 1963 Presiden Sukarno menerima kekuasaan atas Irian Barat dari PBB sebagai lanjutan persetujuan yang dicapai oleh Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962 di PBB. Dan pada hari ini juga Belanda meninggalkan Irian Barat. Pada bulan Desember 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat dan Irian Barat resmi masuk menjadi wilayah Indonesia.<sup>50</sup> Dalam rangka memperingati HUT RI pada tanggal 17 Agustus 1963, Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Genta Suara Revolusi Indonesia (Gensuri). Selanjutnya pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin semakin berkembang ke politik Luar Negeri dengan mewujudkan konsepsi-konsepsi tentang dunia Internasional.

Pada masa Demokrasi Terpimpin sistem pemungutan suara diganti dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketentuan ini terdapat dalam amanat Presiden 1959 yang menyatakan bahwa UUD 1945 adalah asli cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang sejak jaman purbakala mulai mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat

---

<sup>49</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 118.

<sup>50</sup> Suwarno, P.J, 2004: *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*, USD, Yogyakarta, hlm. 54.

dengan pimpinan suatu kekuasaan sentral ditangan seorang sesepuh-seorang ketua yang tidak mendiktator tetapi “memimpin”, “mengayomi”. Dalam tata tertib DPR GR (Peraturan Presiden No.14 Tahun 1960 Pasal 103) yang berlaku sampai September 1964 ditentukan bahwa “Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat”. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa jika tidak tercapai kata mufakat, maka Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah. Dengan demikian kepala eksekutif diberi wewenang dalam proses mengambil keputusan badan legislatif.<sup>51</sup>

Dalam Demokrasi Terpimpin kuatnya pengaruh Sukarno dapat dilihat dari tindakan-tindakan Sukarno antara lain pembubaran DPR diganti dengan DPR GR, pimpinan DPR dijadikan Menteri, Presiden mempunyai wewenang legislatif dan yudikatif. Sukarno dapat membubarkan partai politik yang dianggap menyimpang dari keinginannya dan kemudian membentuk lembaga-lembaga ekstra konstitusional seperti Front Nasional.<sup>52</sup> Presiden Sukarno mempunyai kekuasaan yang besar pada masa ini, selain itu Presiden Sukarno memberikan dukungan dan hak istimewa yang begitu besar terhadap PKI. PKI mendapatkan dukungan yang begitu besar dari Presiden. Kedekatan antara PKI dan presiden dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang akan merebut kursi kepresidenan dengan menuduh PKI sebagai pelaku pemberontakan G.30.S. kemudian presiden diteror dengan pengepungan istana oleh tentara yang tidak dikenal, lalu Suharto memeralat surat perintah Presiden Sukarno

---

<sup>51</sup> Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 196.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 207.



untuk membubarkan PKI pada 11 Maret 1966. peristiwa ini mengakibatkan kursi kepresidenan Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin runtuh dan digantikan oleh Suharto dengan Orde Baru.

### **C. Reaksi TNI-AD terhadap Politik Demokrasi Terpimpin**

Munculnya TNI-AD sebagai kekuatan politik bermula dari diangkatnya kembali kolonel Nasution sebagai kepala Staf Angkatan Darat. Pada pertengahan tahun 1956 terjadi pemberontakan-pemberontakan daerah. Untuk mengatasi pergolakan-pergolakan daerah tersebut merupakan tugas dari AD, pada akhirnya pergolakan tersebut dapat teratasi. Keberhasilan Angkatan Darat dalam mengatasi pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah, dapat memperkuat posisi Angkatan Darat di dalam politik. Angkatan Darat yaitu Nasution dan Sukarno mempunyai kepentingan yang sama dalam masalah stabilitas nasional, peranan partai politik dan pemberlakuan keadaan darurat perang. Karena mempunyai persamaan kepentingan maka tercipta kerja sama untuk membangun stabilitas nasional. Kerja sama yang terjadi antara Angkatan Darat dan Sukarno hanya terbatas pada kepentingan politik timbal balik.

Pergolakan-pergolakan politik yang terjadi menyebabkan situasi politik yang tidak stabil dan menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Untuk memperbaiki stabilitas nasional maka Sukarno berpandangan untuk mengganti Demokrasi Parlementer dengan Demokrasi Terpimpin. Dimana Demokrasi Terpimpin menurutnya sesuai bagi bangsa Indonesia,

karena Demokrasi Terpimpin merupakan demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam menyampaikan perubahan tersebut Sukarno mengemukakan konsep yang tidak jelas mengenai cara-cara perubahan politik tersebut dan usulan tersebut ditolak oleh Dewan Nasional. Pada akhirnya Nasution mengajukan usulan untuk kembali ke UUD 1945 dalam sidang Dewan Nasional 1958. Nasution berpandangan bahwa UUD 1945 menjadi kerangka bagian yang cocok bagi demokrasi terpimpin. Ketika konstituante menolak usulan untuk kembali ke UUD 1945, maka Nasution melarang lembaga tersebut meneruskan sidangnya dan menganjurkan Sukarno untuk kembali ke UUD 1945.

Angkatan Darat dan kabinet membantu Sukarno untuk kembali ke UUD 1945 dengan mempersiapkan situasi dimana UUD 1945 dapat diberlakukan kembali melalui dekrit. Dengan dikeluarkannya dekrit oleh presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, maka UUD 1945 berlaku kembali dan konstituante dibubarkan. Dengan dikeluarkannya dekrit maka berakhirilah periode demokrasi parlementer dan diganti dengan demokrasi terpimpin.

Nasution telah berhasil menempatkan wakil-wakil Angkatan Darat dalam pemerintahan, legislatif dan semua badan negara dalam tatanan politik yang baru, dengan demikian AD telah menempatkan posisi yang kuat dalam panggung politik. Keberadaan Sukarno tetap menjadi tokoh yang paling menentukan, hal ini disebabkan karena Sukarno telah berhasil memperjuangkan dukungan AD bagi tujuannya sendiri. Sukarno selalu memperhatikan kekuatan-kekuatan lawan politiknya dan menempatkan

dirinya sebagai pengambil inisiatif. Kewibawaan AD semakin naik setelah berhasil menumpas pemberontakan di Jawa Barat tahun 1961 dan Sulawesi tahun 1962, maka AD bertekad untuk bertindak tegas terhadap Sukarno. Melihat keadaan seperti ini Sukarno berusaha untuk memotong kekuatan AD dengan mengangkat Mayor Jendral Achmad Yani sebagai panglima Angkatan Bersenjata yang fungsinya lebih terbatas pada koordinasi administratif dan pertahanan sipil. Dengan demikian Sukarno merasa kekuasaannya lebih aman terhadap ancaman kepemimpinan Nasution.<sup>53</sup> Selain Angkatan Darat ada pula PKI sebagai penyeimbang kekuatan politik di Indonesia.

TNI-AD berusaha untuk menciptakan situasi politik yang aman sehingga politik Demokrasi Terpimpin dapat berjalan lancar. Namun pada kenyataannya kekuasaan antara TNI-AD dan PKI menjadi konflik ditandai dengan dicabutnya SOB. SOB dicabut pada 1 Mei 1963 diseluruh wilayah Indonesia. Tujuan Presiden mencabut SOB agar dapat memperkuat posisi Presiden Sukarno sehingga Presiden Sukarno dapat mengatasi kegiatan politik TNI-AD. Setelah SOB dihapus, TNI-AD merasa kesulitan menghadapi gerakan-gerakan PKI. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, faktor pertama PKI telah begitu kuat pengaruhnya didesa-desa dan kota-kota. Faktor kedua legitimasi TNI-AD untuk berpartisipasi didalam politik tergoyah setelah SOB dicabut. Guna memecahkan masalah ganda ini, TNI-AD memasang strategi politik yaitu pengembangan dan peningkatan peranan golongan fungsional untuk melayani politik Presiden Sukarno dan mengimbangi serta menandingi

---

<sup>53</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 193-194.

peranan partai-partai politik yang difokuskan untuk menghadapi PKI. Tujuan dari TNI-AD adalah untuk memperkokoh legitimasi yang tergoyah setelah dicabutnya SOB.<sup>54</sup>

TNI-AD merupakan pelopor golongan fungsional anti PKI. Strategi politik lainnya yang digunakan TNI-AD yaitu TNI dikerahkan dalam bidang non-militer dengan mengutamakan pada pembangunan, proses produksi dan bidang kekaryawanan yang lain. dengan turun langsungnya TNI-AD ke desa-desa, hal ini mencari perhatian dari rakyat di pedesaan. Bila hati rakyat dapat diraih TNI maka TNI dapat dengan mudah memotong dan merobohkan pengaruh PKI di pedesaan dengan dukungan dari pedesaan untuk melawan PKI. Strategi perjuangan TNI-AD untuk menyelaraskan diri dengan tuntutan situasi dan kondisi Negara pada waktu itu justru didominasi oleh PKI.

Peranan TNI-AD sangat berpengaruh terutama untuk menciptakan keamanan dalam situasi politik. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah dapat dikendalikan oleh TNI-AD. Selain itu TNI-AD membantu presiden dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan, sehingga antara Sukarno dan TNI-AD mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung. Namun pada akhirnya keberadaan TNI-AD menjadi konflik antara TNI-AD dan PKI karena dukungan dari Sukarno untuk TNI-AD dan PKI tidak seimbang sehingga menjelang akhir pemerintahan demokrasi terpimpin terjadi konflik.

---

<sup>54</sup> Jahja Muhaimin, (EYD), *op.cit*, hlm. 122-123.

#### D. Reaksi PKI terhadap Politik Demokrasi Terpimpin

Berjalannya Demokrasi Terpimpin dalam pembentukan kabinet gotong royong Sukarno menegaskan bahwa PKI diikut sertakan dalam pemerintahan. Keikutsertaan PKI dalam pemerintahan memungkinkan terbentuknya kabinet kaki empat. Kabinet kaki empat ini terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Keinginan Sukarno untuk memasukan PKI dalam kabinet kaki empat ternyata menghadapi tantangan dari partai-partai lain. Pada tanggal 2 Maret 1957 lima partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PSI mengeluarkan suatu pernyataan bersama yang menolak konsepsi Sukarno tersebut, lembaga ini diberi nama "Liga Demokrasi".<sup>55</sup> Menurut Liga Demokrasi kebijakan Sukarno dalam pembentukan kabinet gotong royong hanya memperlemah peranan parlemen dan hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk berkembang.

Menghadapi ancaman dari Liga Demokrasi, Sukarno memukul balik kelompok pendukung Liga Demokrasi karena dianggap tidak demokratis. Bagi Sukarno kecaman terhadap PKI yang berasal dari Liga Demokrasi dianggap sebagai suatu ketidaksetujuan Liga Demokrasi karena PKI ikut dalam pemerintahan. Dan Liga menganggap keikutsertaan PKI dalam pemerintahan menyebarkan pengaruh komunis. Melihat keadaan seperti ini Sukarno mengambil dan memutuskan tentang eksistensi partai, pada akhirnya Liga Demokrasi dilarang pada tanggal 27 Februari 1961. keinginan Sukarno agar PKI dapat ikut dalam pemerintahan terlaksana pada tahun 1962. PKI

---

<sup>55</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op.cit*, hlm. 195, lihat juga Ulf, Sundhaussen, *op.cit*, hlm. 259.



diwakili oleh Aidit (Sekjen PKI, wakil MPRS) dan Lukman (wakil Sekjen PKI dan wakil DPR GR).

Setelah PKI mendapatkan dukungan dan kekuasaan yang besar pada masa Demokrasi Terpimpin, PKI memperoleh kemajuna-kemajuan yang sangat pesat. PKI dipilih Sukarno untuk mengimbangi kekuasaan Angkatan Darat, karena PKI cerdas dalam menghadapi keadaan selain itu PKI merupakan organisasi yang rapi, disiplin yang baik sehingga PKI mampu memikat Sukarno. Akhirnya Sukarno memilih PKI untuk membantunya dalam urusan pemerintahan dan PKI dapat berkembang dengan pesat. Pada masa Demokrasi Terpimpin kekuatan PKI sangat besar, karena tidak ada tentangan dari partai-partai lainnya dan Sukarno memberikan kesempatan PKI untuk mengembangkan dirinya. Dengan adanya kekuatan PKI maka dapat mengimbangi kekuatan TNI-AD. Kekuatan TNI-AD dan PKI mendapatkan dukungan dari Sukarno, dukungan yang diberikan Sukarno kepada TNI-AD dan PKI harus adil dan tidak memihak manapun. Karena situasi yang saling memberikan dukungan maka TNI-AD dan PKI dapat mendukung jalannya Demokrasi Terpimpin, sehingga Demokrasi Terpimpin dapat berjalan lancar.





### E. Kelompok yang Menentang Demokrasi Terpimpin

Gagasan Sukarno tentang Demokrasi Terpimpin memancing pro-kontra atau pendapat yang kontroversial. Masyumi serta partai Katholik dan daerah-daerah bergolak menolaknya dengan tegas, sedangkan PSI, NU, PSII, IPKI, Parkindo menolaknya secara hati-hati. Tetapi PKI memberikan dukungan dengan kuat.<sup>56</sup>

Masyumi partai yang menentang Sukarno memandang bahwa keikutsertanya dalam suatu sistem politik otoriter sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Selain itu sistem Demokrasi Terpimpin akan membawa bencana bagi bangsa dan negara maka politik Sukarno harus dilawan. Masyumi sebagai cagar demokrasi tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali menghadapi Sukarno dan sistemnya. Dengan sekuat tenaga Masyumi melawan politik Sukarno dan berharap rakyat akan berpihak kepada demokrasi tapi ternyata sia-sia Masyumi tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. PKI dan Sukarno menilai bahwa Masyumi sebagai kekuatan yang merintang penyelesaian revolusi Indonesia maka Masyumi harus disingkirkan.<sup>57</sup> Partai-partai yang tidak setuju dengan Sukarno semangkin terlihat pada tahun 1960, ketika Presiden Sukarno membekukan DPRS karena persoalan Anggaran Belanja Negara yang diajukan Presiden tidak diterima oleh parlemen. Presiden menyatakan akan membentuk DPR GR dimana anggota-anggota yang duduk dalam dewan itu adalah mereka yang disukai dan yang mau ikut Sukarno. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan orang-

<sup>56</sup> Moh. Mahfud, *op.cit*, hlm. 53

<sup>57</sup> Syafii Maarif: 1988, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*, hlm. 58.

orang Masyumi dan PSI yang menentang politik Sukarno harus tersingkir. Maksud dari Presiden Sukarno menimbulkan reaksi hebat, terutama dari kalangan partai. Tidak lama setelah kejadian itu partai Masyumi, PSI, partai Katolik, dan partai IPKI membentuk suatu organisasi yang dinamakan Liga Demokrasi. Tujuan pokok Liga adalah menegakkan demokrasi, menentang pembentukan suatu parlemen gotong royong dan menghadapi bahaya pengaruh komunis.<sup>58</sup>

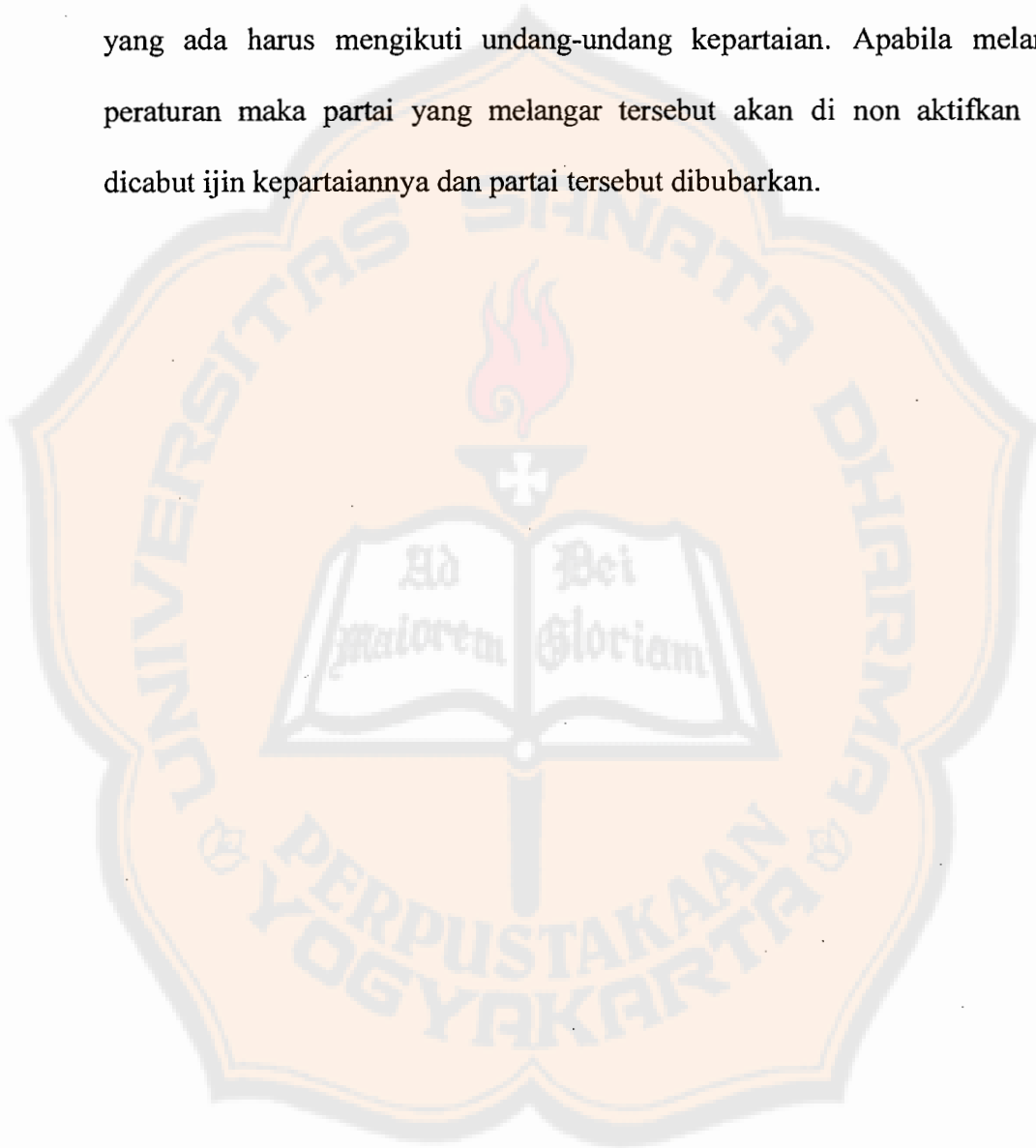
Liga Demokrasi mendapatkan bantuan dan dorongan dari TNI-AD yang kemudian mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh PNI, NU. Pada waktu itu Presiden Sukarno sedang berada di Luar Negeri, Liga mendesak kepada pimpinan TNI-AD untuk maju mengambil kekuatan dari Presiden Sukarno. Setelah Presiden Sukarno pulang dari Luar Negeri dan mendesak Nasution agar melepaskan diri dari Liga Demokrasi dan Sukarno menegaskan akan tetap membentuk Parlemen Gotong Royong. Kemudian Presiden Sukarno berhasil menyusun parlemen yang disebut DPR GR dengan jumlah 263 anggota.<sup>59</sup>

Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah peraturan untuk meletakkan partai politik di bawah pengawasannya, yaitu Peraturan Penyederhanaan kepartaian. Pada bulan Agustus 1960 Presiden Sukarno membubarkan PSI dan Masyumi yang sebelumnya telah membubarkan diri karena dianggap tidak memenuhi persyaratan kepartaian sebagai mana terkandung dalam peraturan kepartaian. Partai yang diperbolehkan hidup dengan resmi oleh pemerintah

<sup>58</sup> Jahja Muhaimin, *op. cit*, hlm. 120. dan lihat juga Syafii Maarif, *op. cit*, hlm. 54.

<sup>59</sup> Jahja Muhaimin, *op. cit*, 121.

hanya 10 partai yaitu: PNI, NU, PKI, PSSI, Perti, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai Indonesia atau Partindo.<sup>60</sup> Pada masa Demokrasi Terpimpin keberadaan partai disederhanakan dan partai-partai yang ada harus mengikuti undang-undang kepartaian. Apabila melanggar peraturan maka partai yang melanggar tersebut akan di non aktifkan atau dicabut izin kepartaiannya dan partai tersebut dibubarkan.



---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 121.

## BAB IV

### FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan dengan tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem Demokrasi Terpimpin yang berlaku memperlihatkan kecenderungan yang kuat ke arah otoriterisme. Presiden Sukarno merupakan pusat dari kekuasaan, sumber utama kekuasaannya adalah karismanya dan posisinya sebagai pemegang tali penyeimbang antara kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan. Presiden Sukarno berusaha untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan, perbedaan dan pertentangan ideologi politik menjadi satu kekuatan yang revolusioner.<sup>61</sup> Realita kehidupan politik yang berkembang dimasa demokrasi terpimpin dengan adanya kekuatan-kekuatan politik justru memperkuat posisinya masing-masing sehingga persaingan politik dan pertentangan ideologi menjadi semakin meruncing antara TNI-AD dan PKI.

Pentas politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin hanya diisi oleh tiga kekuatan yaitu Sukarno, TNI-AD dan PKI. Kedua kekuatan TNI-AD dan PKI selalu dipakai Sukarno sebagai alat penyeimbang kekuasaan. Namun karena Sukarno tidak mampu menyeimbangkan kekuatan antara TNI-AD dan PKI serta perlakuan istimewa yang diberikan Sukarno terhadap PKI mengakibatkan konflik antara TNI-AD dan PKI.

---

<sup>61</sup> Alfian:1978, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm. 39.

Pertentangan dan konflik politik menjadi semakin tinggi terutama antara TNI-AD dan PKI yang sama-sama mempunyai kekuatan riil dan kepribadiannya sendiri. Ledakan konflik yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, menyebabkan Demokrasi Terpimpin runtuh di ganti dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto. Terjadinya peristiwa 30 September 1965 membawa PKI pada kehancuran dimana PKI dituduh melakukan pemberontakan itu yang didalangi oleh Untung, Maka dengan begitu kekuasaan PKI pada masa Demokrasi Terpimpin runtuh.

#### **A. Keberhasilan Membebaskan Irian Barat**

##### **1. Faktor Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan yang diraih oleh suatu bangsa tidak terlepas dari persatuan nasional harus menjadi kepentingan nasional yang di perjuangkan pemeliharaan persatuan bangsa dapat dipupuk melalui perjuangan. Persatuan dan kesatuan merupakan faktor utama untuk dapat mewujudkan kemenangan. Presiden Sukarno dapat mempersatukan kekuatan TNI-AD dan partai serta mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat.

Pada masa sebelum Demokrasi Terpimpin perjuangan pembebasan Irian Barat belum terselesaikan. Perjuangan untuk membebaskan Irian Barat memerlukan waktu sangat panjang. Sebelum masa Demokrasi Terpimpin diplomasi yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan Irian Barat mengalami kegagalan.



Setelah usaha diplomatik mengalami kegagalan, Sukarno merencanakan sikap yang lebih keras dalam penyelesaian masalah ini. Dilakukan penyitaan perkebunan-perkebunan Belanda, perusahaan-perusahaan dagang dan penghancuran hubungan perdagangan. Serta memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pemutusan ini disertai pula dengan peningkatan kekuatan militer Indonesia di Irian Barat.<sup>62</sup>

Kegiatan lain yang dilakukan Sukarno dalam upaya merebut Irian Barat yaitu dengan membentuk Dewan Pertahanan Nasional Indonesia dan mengangkat dirinya sebagai panglima besar pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961 Sukarno mengumumkan Trikora (tri komando rakyat) di Yogyakarta yang intinya adalah mengagalkan pembentukan Negara boneka Papua, Pengibaran bendera merah putih di Irian Barat, serta persiapan melakukan mobilisasi umum.<sup>63</sup> (lihat lampiran IV, Presiden Sukarno sedang membacakan, hlm. 85). dan (lampiran V isi Trikora, hlm. 86).

Sebagai tindak lanjut dari Trikora dibentuk satu pasukan kusus yaitu operasi komando mandala dibawah Mayor Jendral Suharto. Pihak Belanda juga telah melakukan persiapan dan mengirim pasukan ke Irian Barat. Ini merupakan perjuangan yang tidak hanya melalui diplomasi tetapi juga melalui konfrontasi militer (*Force*).

Pada tanggal 15 Januari 1962 kepala-kepala perang dan pesawat-pesawat udara milik Belanda menyerang dua kapal meriam Indonesia.

---

<sup>62</sup> Ganis Harsono: 1985, *Cakrawala Politik Era Sukarno*, Jakarta, Inti Idayu press, hlm. 150-151.

<sup>63</sup> Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit*, hlm. 122.

Salah satu diantaranya Macan Tutul tengelam di laut Arafuru, salah satu korbanya wakil KSAL Jos Sudarso. Insiden ini menimbulkan kemarahan dan kekegetan rakyat Indonesia, mereka ingin membalas serangan Belanda. Akan tetapi Presiden Sukarno tidak mengabdikan desakan rakyat untuk menyerang Belanda.<sup>64</sup>

Sukarno mengirim menteri Luar Negeri ke Washington untuk menemui Kennedy. Kennedy menampilkan Elsworth Bunker seorang diplomat yang menciptakan perumusan dasar untuk megakhiri masalah Irian Barat. Perumusan ini dikenal dengan rencana Bunker, isi pokok rencana Bunker adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1). Pemerintahan Irian Barat harus di serahkan kepada RI.
- 2). Sesudah sekian tahun dibawah pemerintahan RI, rakyat Irian Barat di beri kesempatan untuk menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri.
- 3). Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.
- 4). Untuk menghindarkan terjadinya bentrok fisik antara kekuatan-kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB yang lamanya 1 tahun. Waktu ini dipakai untuk memulangkan seluruh militer dan pegawai Belanda.

---

<sup>64</sup> Ganis Harsono, *op.cit*, hlm. 151.

<sup>65</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 123-124.

Pihak Republik Indonesia menerima prinsip-prinsip rencana Bunker dengan baik, ternyata menambah simpati dunia terhadap Republik Indonesia. Belanda tidak mau menerima rencana Bunker, akan tetapi Amerika Serikat memaksa Belanda untuk menerima rencana Bunker tersebut. Atas desakan Amerika Serikat kepada Belanda, sebagai gantinya Amerika Serikat memberikan jaminan ekonomi kepada Belanda. Belanda berharap dengan lepasnya Irian Barat dari tangan Belanda perekonomian Belanda tetap dapat berjalan, dengan cara inilah kepala batu Belanda dapat dicairkan.<sup>66</sup> Walaupun Indonesia sudah siap dengan perlengkapan perang yang sewaktu-waktu dapat dikirim ke Irian Barat, Indonesia mau menyelesaikan kasus Irian Barat secara damai. Asalkan Belanda dalam perundingan penuh keiklasan bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dan menepati janjinya kalau perundingan yang menghasilkan penyerahan itu telah disetujui. Syarat ini penting untuk menghindari terulangnya taktik tipu muslihat Belanda.<sup>67</sup>

Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan New York antara Menlu Subandrio yang mewakili Republik Indonesia dan Van Royen serta Schuurmann yang mewakili Belanda, disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker. (lihat lampiran VI, Persetujuan antara Indonesia dan Belanda atas Irian Barat, hlm. 87) dan (lampiran VII, Naskah Rentjana Resolusi Indonesia-Belanda, hlm. 93)

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

<sup>67</sup> Baharuddin Lopa: 1962, *Djalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Djakarta, Pertjetakan dan Periklanan Daja Upaja, Djakarta(EYD). hlm. 80-81.

Penanda tangan persetujuan itu di MB-PBB, isi pokok persetujuan New York sebagai berikut.<sup>68</sup>

- 1). Netherland akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB (UNTEA=*United Nations Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Oktober 1962.
- 2). Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk di gantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
- 3) Pemerintahan UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia pada tanggal ini bendera PBB diturunkan.
- 4) Selama masa UNTEA sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan di pulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.
- 5) Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Tercapainya persetujuan tersebut diterima oleh DPR kedua Negara, maka dengan demikian persetujuan antara Republik Indonesia dan Belanda tercapai (lihat lampiran VIII Pernyataan Pendapat DPR-GR tentang Persetujuan Indonesia Belanda, hlm. 94). Akhirnya cita-cita

---

<sup>68</sup> Moedjanto, *op.cit*, hlm. 124.

memasukkan Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia telah tercapai. Hal ini ditandai dengan penurunan bendera Belanda dan pengibaran Sang Saka Merah Putih pada tanggal 31 Desember 1962, Maka sejak saat itu Irian Barat sah menjadi milik Indonesia.

## **2. Sumbangan terhadap Negara**

Sumbangan yang diberikan kepada Negara setelah Irian Barat kembali kepangkuan Ibu Pertiwi yaitu persatuan dan kesatuan untuk melawan musuh sangat penting. Karena adanya tujuan yang sama, maka rakyat Indonesia dapat bersatu bersama-sama memperjuangkan Irian Barat. Selain itu pentingnya persatuan dan kesatuan sangat perlu dijaga untuk membangun Republik Indonesia.

Rakyat Indonesia tetap bertekad dengan jalan apapun akan berjuang membebaskan Irian Barat, apalagi setelah terjadi peristiwa Aru yang mengakibatkan tewasnya Komodor Jos Soedarso. Peristiwa ini semakin membakar semangat dan kekuatan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat, terutama Indonesia telah bertekad dalam memperjuangkan Irian Barat. Melihat ketekatan Indonesia Belanda bahkan dunia berpendapat perjuangan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat semakin nyata.

Usaha yang dilakukan Sukarno dengan mempersatukan kekuatan-kekuatan dari partai-partai, TNI-AD dan atas dukungan rakyat untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda dapat berhasil. Irian Barat secara



sah menjadi milik Indonesia dan menjadi bagian dari Republik Indonesia melalui penyelesaian secara damai.

Penyelesaian sengketa Irian Barat secara damai membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda. Roda pemerintahan RI sudah mulai berputar, E.J. Bonay putra Irian asli diangkat sebagai Gubernur Irian Jaya yang pertama. Sejak UNTEA pemerintah RI mengambil berbagai tindakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, terutama dalam pendidikan menyumbangkan guru-guru kesana. Selain itu pengerahan tenaga pembangunan ke Irian Barat dilakukan disegala bidang, bidang pertamina, tambang tembaga. Hal ini dikarenakan pemerintah RI menaruh perhatian atas pembangunan Irian Barat, kemudian Pepera menghasilkan pendapat rakyat Irian Barat tetap bersatu dalam Republik Indonesia.

Dengan kemenangan diplomasi ini dapat dilihat bahwa sesuatu perjuangan diplomasi akan mencapai hasil dengan baik bila disertai pula dengan kekuatan fisik. Selain itu harus didukung pula dengan kekuatan angkatan perang yang setiap kali diplomasi mengalami jalan buntu. Dalam menggunakan kekuatan fisik (*force*) tergantung atas dasar-dasar hukum dan keadilan, seperti dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia atas wilayah Irian Barat.

## B. Kegagalannya Terjadi Pemberontakan G. 30. S

### 1. Faktor Penyebab Kegagalan

Presiden Sukarno mengikut sertakan PKI dalam pemerintahan, memungkinkan terbentuknya Kabinet Kaki Empat yaitu terdiri dari PNI, Masyumi, NU, PKI. Terbentuknya Kabinet Kaki Empat ini bertujuan untuk menciptakan kegotong-royongan nasional. Namun kehadiran PKI dalam pentas politik nasional tidak disetujui oleh partai-partai lain. Walaupun PKI mendapatkan tentangan dari partai-partai lain namun Sukarno tetap mengikut sertakan PKI dalam pemerintahan. Alasan Sukarno mengikut sertakan PKI karena menurutnya PKI memiliki organisasi yang kuat dan lebih revolusioner. Keberadaan PKI dalam politik Indonesia untuk mengimbangi kekuasaan dari TNI-AD yang nantinya TNI-AD dan PKI dapat bekerjasama dalam memperjuangkan dan membangun RI.

Perkembangan politik yang ada dalam Demokrasi Terpimpin, PKI semakin berkembang dan semakin kuat. Berbagai cara yang dilakukan oleh PKI untuk memperluas dan memperkuat diri yaitu dengan cara melalui komunikasi politik. Selain itu sikap dan tingkah laku Sukarno banyak memberi angin kepada PKI. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan politik yang menguntungkan PKI.

Untuk lebih memperkuat posisi PKI Sukarno memasukkan Aidit dan Lukman kedalam badan pencekat kepemimpinan nasional yang statusnya serupa dengan kabinet, tetapi tanpa pertanggung jawaban

Eksekutif.<sup>69</sup> Posisi PKI semakin meningkat dan Presiden Sukarno melibatkan PKI dalam pengambilan kebijakan politik. Kerjasama yang didukung oleh Sukarno dapat berjalan lancar. Namun dalam perkembangan selanjutnya kerjasama antara PKI dan TNI-AD menjadi semakin memanas karena PKI dan TNI-AD memerlukan dukungan dari Sukarno tetapi Sukarno lebih condong membela PKI. Ketidak seimbangan yang di berikan oleh Sukarno kepada PKI dan TNI-AD inilah yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan.

Perebutan kekuasaan yang terjadi antara TNI-AD dan PKI dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merebut kekuasaan. Akhirnya perebutan kekuasaan yang diwarnai pemberontakan terjadi, pemberontakan ini dikenal dengan peristiwa G 30 S. Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Suharto dengan cara apapun akan dilakukan asalkan tujuannya dapat tercapai. Untuk memperoleh kursi kepresidenan RI, Suharto mendekati diri dengan PKI karena pada waktu itu PKI sangat dekat dengan Sukarno. Suharto mengakrabkan diri dengan orang-orang yang berpaham komunis yaitu dalam hubungan dengan tokoh-tokoh komunis sebagai pendukung pemberontakan PKI Madiun dan dengan tokoh-tokoh PKI yang bekerja untuk militer atau untuk PKI sendiri. Selain itu Suharto bersahabat dengan Untung dan A.Latif, persahabatan yang dijalankan oleh Suharto hanya memenuhi kepentingannya untuk menguasai presiden Sukarno. Meskipun persahabatan akan segera

---

<sup>69</sup> Legge, *op. cit*, hlm. 423.

diputuskan oleh Suharto apabila situasi dan kondisi tidak menguntungkan dirinya. Suharto memanfaatkan persahabatan antara Untung dan Latif untuk dapat membantu dirinya dalam pemberontakan. Sifat Suharto yang praktis tersebut ternyata menguntungkan untuk menghadapi situasi yang cepat berubah. Terakhir tampak pada Latif, Untung dan Supardjo pada tanggal 30 September pukul 23.00 masih merencanakan akan bertemu Suharto, meskipun yang jadi bertemu hanya Latif sendiri. Namun pada tanggal 1 Oktober 1965 Suharto menuduh Untung dan kawan-kawan mengadakan pemberontakan dengan menculik para jendral dan berusaha membunuh Presiden. Walaupun rencana untuk membunuh Presiden Sukarno gagal dilakukan.<sup>70</sup>

Melihat situasi ini Suharto berusaha untuk menghancurkan Untung dan bersikap pura-pura melindungi presiden dan keselamatan RI dari pemberontakan yang dipimpin oleh Untung dengan dukungan PKI. Dengan keadaan seperti ini Suharto dapat menempatkan diri sebagai pembela para Jendral yang diculik dan penyelamat negara dari pemberontakan. Kemudian Suharto menuduh untung yang melakukan pemberontakan itu dengan dukungan PKI.<sup>71</sup> Keterlibatan PKI seperti yang dituduhkan Suharto dalam pemberontakan itu belum terbukti. Pada intinya PKI dituduh oleh Suharto melakukan pemberontakan, Suharto hanya ingin merebut kekuasaan dari tangan Sukarno dan PKI. Perkembangan selanjutnya tampak bahwa Suharto menginginkan kedudukan Presiden,

---

<sup>70</sup> Suwarno, P.J, 2004, *op.cit*, hlm. 87-88.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 89.

Suharto menggunakan PKI karena pada waktu itu PKI dekat dengan Sukarno. Lambat laun tuduhan terhadap PKI dapat meyakinkan seluruh rakyat dan militer bahwa PKI melakukan pemberontakan itu. Dan selanjutnya Jendral Suharto meneruskan perjuangan untuk merebut kedudukan Mayjen Pranoto Reksosamodro sebagai *care taker* dengan alasan seolah-olah terjadi dualisme dalam kepemimpinan Angkatan Darat. Presiden terpaksa menghentikan Mayjen Pranoto Reksosamodro karena Nasution menemukan surat dari Latif yang ditujukan padanya. Selain itu presiden mengangkat Suharto menjadi panglima Angkatan Darat. Dengan kedudukan yang dimiliki Suharto, Suharto memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bertindak membuktikan tuduhan terhadap PKI yang diambil dari Yoga Sugomo bahwa PKI lah yang berada dibelakang Untung sebagai pemimpin G. 30. S.<sup>72</sup>

Kekacauan sosial politik yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh Suharto untuk menyerang Sukarno. Suharto ingin merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Sukarno. Karena Sukarno dekat dengan PKI maka Suharto memanfaatkan PKI untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk merebut kursi kepresidenan RI, Suharto harus dapat mengalahkan PKI dengan kekuatan masa dengan begitu Suharto akan mudah menduduki kursi kepresidenan RI.

Kemudian ditemukan mayat para Jendral yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya, yang merupakan wilayah kekuasaan Angkatan Darat.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 95.



Dengan demikian tuduhan Suharto terhadap PKI semakin dipercayai oleh rakyat dan kemudian gerakan-gerakan anti PKI muncul dimana-mana. Akhirnya muncul gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengemukakan tiga tuntutan rakyat atau dikenal dengan Tritura yang isinya pembubaran PKI, bersihkan kabinet dari semua anasir pro komunis atau yang tidak kompeten dan turunkan harga barang. Setelah presiden diteror dan pengepungan istana oleh tentara yang tidak dikenal dengan demikian Suharto memeralat surat perintah presiden Sukarno untuk membubarkan PKI pada tanggal 11 Maret 1966.<sup>73</sup> Peristiwa tersebut mengakibatkan kursi kepresidenan Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin runtuh dan sebagai penggantinya adalah Suharto dengan Orde Baru.

## 2. Dampak bagi Negara

Dampak bagi negara yaitu keberadaan PKI dalam melaksanakan politik Demokrasi Terpimpin, PKI mampu menyeimbangkan kekuatan dari TNI-AD. PKI merupakan contoh dari partai yang mempunyai organisasi yang kuat dan disiplin. Organisasi yang kuat mendorong Sukarno memilih PKI sebagai penyeimbang kekuatan politik dari TNI-AD.

Bagi Sukarno PKI dapat mempertahankan kekuasaannya dan tanpa adanya dukungan dari PKI Demokrasi Terpimpin akan hancur. Cara-cara perjuangan PKI yang radikal membuat Sukarno menaruh perhatian pada

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 96-97.

PKI. Karena menurutnya cara perjuangan yang radikal sesuai dengan jiwa Sukarno. Perimbangan kekuasaan antara PKI dan TNI-AD dapat dibina tanpa ada yang dirugikan, sehingga pelaksanaan demokrasi terpimpin dapat berjalan.

Guna memperlancar pelaksanaan demokrasi, seharusnya Sukarno bisa mendirikan partai pelopor. Tujuan dari didirikan partai pelopor ini untuk dijadikan sandaran dukungan apabila diperlukan. Keinginan untuk mendirikan partai pelopor pernah disinggung ketika Dewan Nasional dibentuk pada tahun 1959. Partai pelopor ini bukan saja memimpin partai-partai lain tetapi juga memayungi semua kekuatan sosial politik agar kekuatan-kekuatan revolusioner dapat dipersatukan untuk menyelesaikan revolusi yang belum selesai. Untuk menyelesaikan revolusi dengan berhasil perlu sekali kekuatan satu partai atas partai yang lain. Namun partai pelopor yang terdiri dari nasionalis-revolusioner tidak pernah terwujud.<sup>74</sup>

Pada akhirnya keseimbangan politik menjadi kacau karena tidak adanya partai yang dapat menjadi sandaran dalam menghadapi kondisi sosial politik yang kacau. Pada akhir masa Demokrasi Terpimpin perebutan kekuasaan yang terjadi mengakibatkan pemberontakan. Ada yang menjadi korban kejahatan dari perebutan kekuasaan dan ada pula yang menikmati hasil dari pemberontakan itu.

---

<sup>74</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *op. cit.*, hlm. 158.

## BAB V

### KESIMPULAN

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum pernah mencapai stabilitas politik yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari seringnya terjadi pergantian kabinet, sebelum kabinet melaksanakan program kerjanya dan menciptakan kekuatan politik. Karena seringnya terjadi pergantian kabinet dan program pemerintahan, maka sulit untuk membangun dan mencapai stabilitas yang kuat. Kegagalan dari sistem Demokrasi Liberal mendorong Sukarno untuk mengganti sistem demokrasi yang lain. Menurut Sukarno sistem yang akan digunakan sebagai pengganti Demokrasi Liberal adalah Demokrasi Terpimpin. Karena menurutnya Demokrasi Terpimpin mampu mengatasi keadaan politik yang kacau, maka muncullah ide Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin dikeluarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin, pidato peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang berintikan USDEK sebagai pedoman pelaksanaannya yang keiak pidato ini dikenal dengan manifesto politik dan ketetapan sebagai GBHN oleh MPRS. Walaupun dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin mengalami pro dan kontra dari berbagai pihak, namun Demokrasi Terpimpin tetap terus berjalan.

Sukarno ingin menerapkan konsepsi tentang pembentukan kabinet Gotong Royong dan pembentukan Dewan Nasional. Konsepsinya tersebut diutarakan sebelum pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin Sukarno ingin melaksanakan konsepsinya tersebut, karena menurut Sukarno pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sesuai dengan kebudayaan dan tradisi Bangsa Indonesia. Sehingga dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin dapat memperbaiki masalah-masalah politik yang terjadi di Indonesia dan pelaksanaan politik di Indonesia dapat berjalan lancar. Apabila pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin berjalan lancar, maka pembangunan dalam segala bidang dapat terlaksana.

Selain itu TNI-AD sangat berperan dalam pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin dimulai dari persiapan dalam pemberlakuan kembali UUD 1945 melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959. TNI-AD membantu Presiden Sukarno dalam menciptakan situasi politik yang aman. Selain peranan TNI-AD ada pula peranan PKI dalam politik Demokrasi Terpimpin yaitu sebagai penyeimbang kekuasaan yang diberikan oleh TNI-AD. PKI merupakan partai yang mempunyai organisasi yang kuat sehingga Presiden Sukarno mempercayai PKI sebagai penyeimbang kekuasaan TNI-AD.

Pada awalnya Presiden Sukarno dapat menyatukan kekuatan dan menyeimbangkan kekuatan atas negara RI yang didukung oleh TNI-AD dan partai-partai dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Sehingga mampu memaksa pihak Belanda untuk menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada RI. Keberhasilan yang diraih dalam pembebasan Irian Barat tercantum dalam

perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. persetujuan perjanjian New York di tandatangi oleh Menlu Subandrio yang mewakili RI dan Van Royen serta Schuurmann yang mewakili Belanda, disaksikan oleh Sekjen PBB U Thant dan Bunker di MB-PBB. Namun perebutan kekuasaan yang terjadi antara TNI-AD dan PKI semakin memburuk. Pada akhirnya Presiden Sukarno tidak dapat mengendalikan kekuatan TNI-AD dan tidak dapat menjaga keseimbangan antara TNI-AD dan PKI. Karena Presiden Sukarno lebih memberikan hak istimewa kepada PKI dan PKI mendapatkan dukungan yang kuat dari Presiden. Kedekatan PKI dengan Presiden di manfaatkan oleh seseorang yang menginginkan kursi kepresidenan. Yang kemudian terjadi peristiwa pemberontakan G.30. S, dalam peristiwa ini Suharto menuduh Untung yang melakukan pemberontakan itu dengan dukungan PKI.

Perkembangan selanjutnya tampak bahwa Suharto menginginkan kedudukan Presiden, Suharto menggunakan PKI karena pada waktu itu PKI dekat dengan Sukarno. Lambat laun tuduhan terhadap PKI dapat meyakinkan seluruh rakyat dan militer bahwa PKI melakukan pemberontakan itu. Selain itu Presiden mengangkat Suharto menjadi panglima Angkatan Darat, dengan kedudukan yang dimiliki Suharto memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa PKI lah yang berada dibelakang Untung sebagai pemimpin G. 30. S. Kemudian rakyat dan gerakan-gerakan anti PKI muncul dimana-mana dan akhirnya muncul gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai bentuk reaksi protes terhadap PKI yang mengemukakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Setelah Presiden diteror dan pengepungan istana oleh tentara yang tidak dikenal dengan



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy,  
1966 : *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Abdullah Alamudin,  
1991 : *Apakah demokrasi itu : what is democracy*, United States Information, Agency.
- Alfian,  
1978 : *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution,  
1995 : *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosiolegal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta.
- Baharuddin Lopa,  
1962 : *Djalannja Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Pertjetakan dan Periklanan Daja Upaja, Djakarta.(EYD).
- Badri Yatim,  
1985 : *Soekarno, Islam dan Nasional*, Inti Sarana Aksara, Jakarta.
- Dahm, Bernhard,  
1987 : *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta.
- Dawam Rahardjo,  
1985 : *Esei-esei Ekonomi Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Deppen RI,  
1959 : *Amanat Pembangunan Presiden pada Sidang Pleno Depernas Tentang PNSB Tanggal 28 Agustus 1959*, Deppen RI, Jakarta.
- ,  
1959 : *Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959*, Deppen RI, Djakarta.(EYD).
- Djadji Darmowijono, R,  
1964 : *Uraian Manipol: Garis-garis Besar Haluan Negara*, Madjelis Luhur Taman Siswa, Jogjakarata.(EYD).

- Ebenstein, William,  
1963 : *Isme-isme Dewasa ini*, Penerbit Swada, Djakarta.
- Feith, Herbert dan Lance Castles,  
1988 : *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3ES, Jakarta.
- Feith, Herbert,  
1995 : *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ganis Harsono,  
1985 : *Cakrawala Politik Era Soekarno*, Inti Idayu Press, Jakarta
- Gottschalk, Louis,  
1975 : *Mengerti Sejarah Pengantar Ilmu Sejarah (terjemahan)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Jahja Muhaimin,  
1971 : *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gama Press, Yogyakarta.
- ,  
1971 : *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia*, Seri Penerbit Skripsi Terbaik, Yogyakarta.(EYD).
- Kahcudin Yunus,  
1959 : *Bersamaisme atau Ekonomi Terpimpin*, Lembaga Sukses Indonesia, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo,  
1995 : *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Legge, J, D,  
1985 : *Sukarno: Sebuah Biografi Politik: Sukarno: A Political Biography* 1972, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Legge, J, D, dkk,  
1994 : *Demokrasi di Indonesia Tahun 1950an dan 1990an; Democracy in Indonesian 1950's and 1990's*, Melbourne, Monash University.
- Leifer, Michael,  
1986 : *Politik Luar Negeri Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Lev, Daniel, S,  
1996 : *The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics 1857-1959*, Cornell Univercity Press, Ithaca.

- Miriam Budiardjo,  
1986 : *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Moedjanto, G,  
1988 : *Indonesia Abad ke-2 Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- ,  
1988 : *Demokrasi Terpimpin*, SPPS, Sei XV, No.1.
- Moh Mahfud,  
1993 : *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohamad Ridwan Indra, Sophian Marthabaya,  
1987 : *Peristiwa-peristiwa disekitar Proklamasi 17-8-1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohamad Noor,  
1985 : *Generasi Soekarno-Hatta*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Hatta,  
1982 : *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tintamas, Jakarta.
- ,  
1960 : *Ekonomi Terpimpin*, Penerbit Djakarta.(EYD).
- Mohammad Yamin,  
1959 : *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid 1*, Siguntang, Djakarta.(EYD).
- Nazaruddin Syamsuddin,  
1988 : *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek* Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Abdulgani, dkk,  
1995 : *Demokrasi Indonesia*, Widya Patria, Yogyakarta.
- Salam Solichin,  
1981 : *Bung Karno Putra Fajar*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sartono Kartodirjo,  
1992 : *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sayidiman Suryohadiprojo,  
1986 : *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, Jakarta, UI Press.

Simorangkir dan Mangreng Say,

1959 : *Tentang dan Sekitar UUD 1945*, Penerbit Djambatan, Djakarta.

Soekarno,

*Manifesto Politik RI 17 Agustus 1959*, Departemen Penerangan RI.(Tanpa Tahun Penerbit).

-----,

*Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi di bawah Bendera Revolusi*, jilid I, Jakarta (tanpa penerbit, tanpa tahun).

Subagyo,

1959 : *Manipol-Usdek dalam Mata Peladjaran: Kata Pengantar Oleh Soekarno Presiden RI*, Tjiptakarya, Djakarta.

Sundhaussen, Ulf,

1986 : *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, LP3ES Kincir Buana , Jakarta.

Suwarno, P.J,

2004 : *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Syafii Maarif,

1988 : *Islam dan Poltik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Pustaka Parama Abiwara, Yogyakarta.

Willie Koen,

1980 : *30 tahun Indonesia Merdeka*, Tira Pustaka, Jakarta.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**LAMPPIRAN**



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SILABUS

Nama Sekolah : SMU Negeri 8  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas/Semester : 2/genap  
 Standar Kompetensi : Kemampuan menjelaskan perkembangan Demokrasi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia

Kompetensi dasar	Indikator / materi pokok	Materi pembelajaran	Pengalaman belajar	Alokasi waktu	Penilaian			Sumber bahan
					Jenis tagihan	Bentuk tagihan	Contoh tagihan	
Menguraikan perkembangan Demokrasi Terpimpin	Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin	1. Faktor politik 2. Faktor sosial 3. Faktor ekonomi	Menyebutkan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin	2 x 45'	Tugas individu	Uraian	1. Jelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya politik Demokrasi Terpimpin. 2. Jelaskan faktor ekonomi lahirnya Demokrasi Terpimpin. 3. Jelaskan faktor sosial lahirnya Demokrasi Terpimpin.	Legge, J.D, 1985: <i>Sukarno Sebuah Biografi Politik</i> , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Nazaruddin Sjamsuddin(ed), 1988: <i>Sukarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek</i> , Rajawali Press, Jakarta. Bernhard Dahm, 1987: <i>Sukarno dan Perjuangan kemerdekaan</i> , LP3ES, Jakarta. Sukarno, <i>Manifesto Politik RI 17 Agustus 1959</i> , Deppen RI.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsepsi politik Presiden Sukarno.</li> <li>2. Pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin</li> <li>3. Peranaan TNI-AD dalam pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin</li> <li>4. Reaksi PKI dalam pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin.</li> <li>5. Kelompok yang menentang politik Demokrasi Terpimpin</li> </ol>	Mendiskusikan pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin	4 x 45'	Tugas kelompok	Buat makalah	Dipresentasikan di depan kelas	
--	---	---	---	---------	----------------	--------------	--------------------------------	--

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>Menjelaskan faktor penyebab keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan politik Demokrasi Terpimpin</p> <p>Agar siswa lebih mengenal arti demokrasi</p>	<p>1.-Faktor penyebab keberhasilan -Sumbangan terhadap negara</p> <p>2.-Faktor penyebab kegagalan -Sumbangan terhadap negara</p> <p>Manfaat demokrasi</p>	<p>- Menyebutkan faktor penyebab keberhasilan - Menyebutkan faktor penyebab kegagalan</p> <p>Mandiskusikan dampak (+) dan (-) demokrasi</p>	<p>2 x 45'</p> <p>2 x 45'</p>	<p>Tugas individu</p> <p>Tugas kelompok</p>	<p>Uraian</p> <p>Buat makalah</p>	<p>1. Jelaskan faktor yang menyebabkan keberhasilan politik Demokrasi Terpimpin.</p> <p>2. Jelaskan sumbangan bagi negara pelaksanaan politik Demokrasi Terpimpin.</p> <p>3. Uraikan secara singkat faktor penyebab kegagalan politik Demokrasi Terpimpin.</p> <p>Dipersentasikan didepan kelas</p>
---	---	---	-------------------------------	---	-----------------------------------	---

Mengetahui  
Yogyakarta, 9 Mei 2005  
Kepala Sekolah

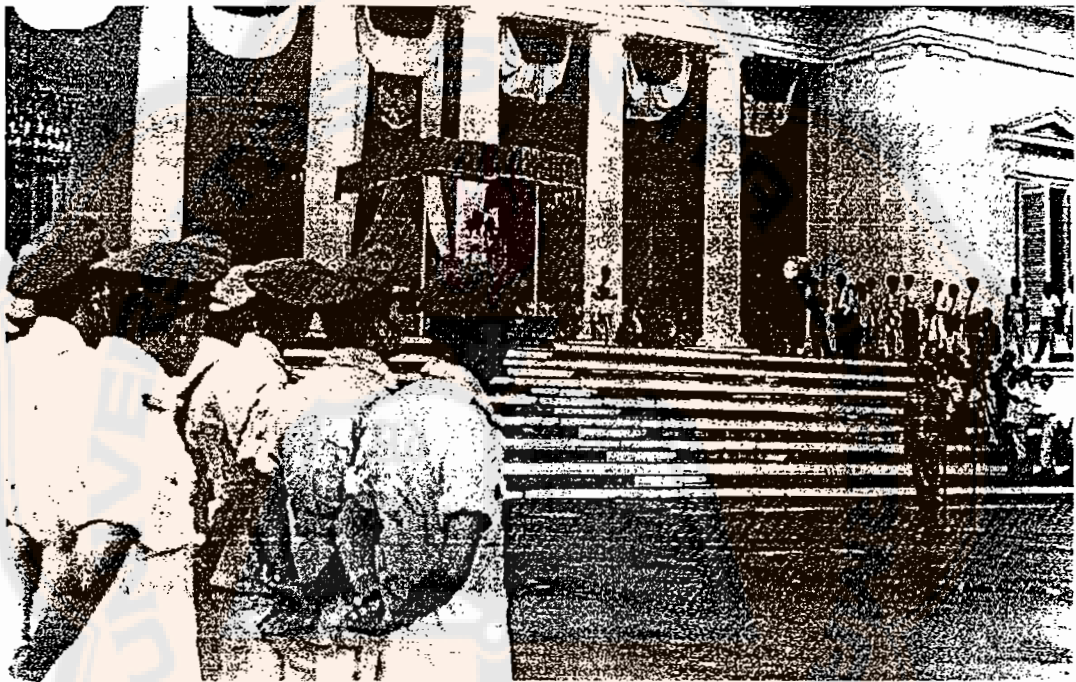
Drs. Timbul Mulyono

Pengesahan

Guru Mata Pelajaran

Muji Lestari

Lampiran II



Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

## II

**DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA  
TERTINGGI ANGKATAN PERANG  
TENTANG  
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa,**

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN PERANG,**

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara ;

Bahwa berhubung dengan pernjjataan sebagian terbesar Anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjjlesaikan tugas jang dipertjjajakan oleh Rakjat kepadanya ;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangij pembangunan semesta untuk mentjjapai masjjarakat jang adil dan makmur ;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjjelamatkan Negara Proklamasi ;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjjiwai Undang-undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut ;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,



KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante ;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Djuli 1959  
Atas nama Rakjat Indonesia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Tertanda  
*Soekarno*

TJATATAN :

- a. Beberapa fakta historis sekitar Dekrit :
    1. 19 Februari 1959 : Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai „pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945”.
    2. 20 Februari 1959 : Presiden menyetujui keputusan Kabinet tsb.
    3. 2 Maret 1959 : Keterangan Pemerintah didepan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
    4. 3 dan 4 Maret 1959 : DPR mengadakan pemandangan umum dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pemerintah sekitar keputusan Dewan Menteri tsb.
    5. 25 Maret 1959 : Djawaban Pemerintah setjara tertulis kepada DPR.
    6. 22 April 1959 : Amanat Presiden didepan Konstituante, jang memuat andjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.
    7. 29 April s/d 13 Mei 1959 : Konstituante mengadakan Pemandangan Umum mengenai andjuran Pemerintah tsb.
    8. 21 Mei 1959 : Djawaban Pemerintah kepada Konstituante.
    9. 25 dan 26 Mei 1959 : Konstituante mengadakan Pemandangan penegasan mengenai andjuran Pemerintah itu.
    10. 27 Mei 1959 : Djawaban Pemerintah kepada Konstituante mengenai Pemandangan penegasan tsb.
    11. Pemungutan suara di Konstituante mengenai andjuran Pemerintah : „Penetapan Undang-undang Dasar 1945 mendjadi Undang-undang Dasar Republik Indonesia”.
      - A. Pemungutan suara ke I, tanggal 30 Mei 1959.  
 Hadir 478 anggota ; setuju 269 ; tidak setuju 199.  
 Pemungutan suara dilakukan setjara terbuka.
      - B. Pemungutan suara ke-II, tanggal 1 Djuni 1959.  
 Hadir 469 anggota ; setuju 264 ; tidak setuju 204.  
 Pemungutan suara ini dilakukan setjara tertutup.
      - C. Pemungutan suara ke-III, tanggal 2 Djuni 1959.  
 Hadir 469 anggota ; setuju 263 ; tidak setuju 203.  
 Pemungutan suara ini dilakukan setjara terbuka.
- Pemungutan suara mengenai UUD 1945 ini didahului dengan pemungutan suara mengenai usul amandemen dari blok Islam dalam Konstituante, jang disetujui oleh 201 suara, tetapi ditolak oleh 265 suara, pada tanggal 29 Mei 1959.
- Oleh karena, baik andjuran Pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945, maupun usul amandemen fihak blok Islam, tidak

mendapat dukungan sekurang-kurangnya dua-per-tiga dari jumlah suara anggota yang hadir dalam rapat Konstituante tsb (Pasal 137 UUDS 1950), maka andjuran Pemerintah dan usul amandemen tsb tidak dapat diterima oleh Konstituante.

Keterangan: Usul amandemen tsb adalah menambahkan dalam Pembukaan dan dalam Pasal 29 UUD 1945 kalimat: ..... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja.

12. 5 Djuli 1959: Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali kepada UUD 1945.

b. Tindakan mendekritkan kembali ke UUD 1945 (menurut pendapat Ketua Mahkamah Agung dalam suatu wawantjara. chas dengan Ketua Dewan Redaksi Suluh Indonesia, tanggal 11 Djuli 1959) didasarkan pada suatu hakekat hukum tidak tertulis, yang dalam bahasa Belanda dinamakan staatsnoodrecht. Ini berarti, bahwa dalam hal keadaan ketata-negaraan tertentu, kita dapat terpaksa mengadakan tindakan yang menjimpang dari peraturan-peraturan ketata-negaraan yang ada. Dan keadaan ketata-negaraan yang memaksa ini, dianggap oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang ada dalam negara kita. Dan berdasar atas inilah dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali ke UUD 1945 dikeluarkan. Hal ini terumus dalam konsiderans alinea ketiga dan keempat yang berbunyi: bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketata-negaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintanggi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat yang adil dan makmur, dan bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi.

Djadi dilihat dari segi hukum ketata-negaraan, tindakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang didasarkan atas keadaan yang memaksa, memang dibenarkan.

(Demikian a.l. Ketua Mahkamah Agung dalam wawantjara tsb.).

c. Dekrit ini dengan tegas memerintahkan pembentukan MPR Sementara, yang terdiri atas Anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Tidak ditegaskan oleh dekrit ini, badan manakah yang menjalankan kekuasaan MPR selama MPR-Sementara belum terbentuk.

Penetapan Presiden No 2 tahun 1959 beserta Pendjelasannja (sebagai



pelaksanaan daripada Dekrit ini) kami muat dihalaman .....

d. Dekrit ini djuga dengan tegas memerintahkan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, jang akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja. Djuga mengenai DPA tidak ditegaskan badan manakah jang mendjalankan kekuasaannja selama DPA-Sementara belum terbentuk.

Penetapan Presiden No 3 tahun 1959 beserta Pendjelasannja (sebagai pelaksanaan dari pada Dekrit ini) kami muat dihalaman .....

Pada 31 Djuli 1959 nama-nama dari pada Anggota DPA Sementara itu telah diumumkan.

e. Piagam Djakarta, jang „in konkreto merupakan kegagalan Konstituante” (Keterangan: Penjusun mengartikan „kegagalan” disini tidak lain dari pada: tidak memenuhi sjarat konstitusionil  $\frac{3}{4}$ ), disebut-sebut djuga dalam Dekrit ini, sebagai kejakinan pribadi Presiden dan ditempatkan dalam konsiderans dan bukan dalam diktum.

f. Dekrit ini tidak menegaskan kepastian kedudukan UUD 1945, dalam arti, apakah UUD 1945 itu telah djadi UUD Tetap bagi Negara RI, ataukah masih bersifat sementara. (Pertanjaan mengenai apakah masih bersifat sementara ini, dapat kiranja dihubungkan a.l. dengan pasal 3, dimana dengan tegas dikatakan, bahwa MPR lah jang akan menetapkan UUD).

Jang pasti dan tegas dalam Dekrit ini ialah, bahwa: UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dakrit ini, dan tidak berlakunja lagi UUDS 1950.

Lampiran IV

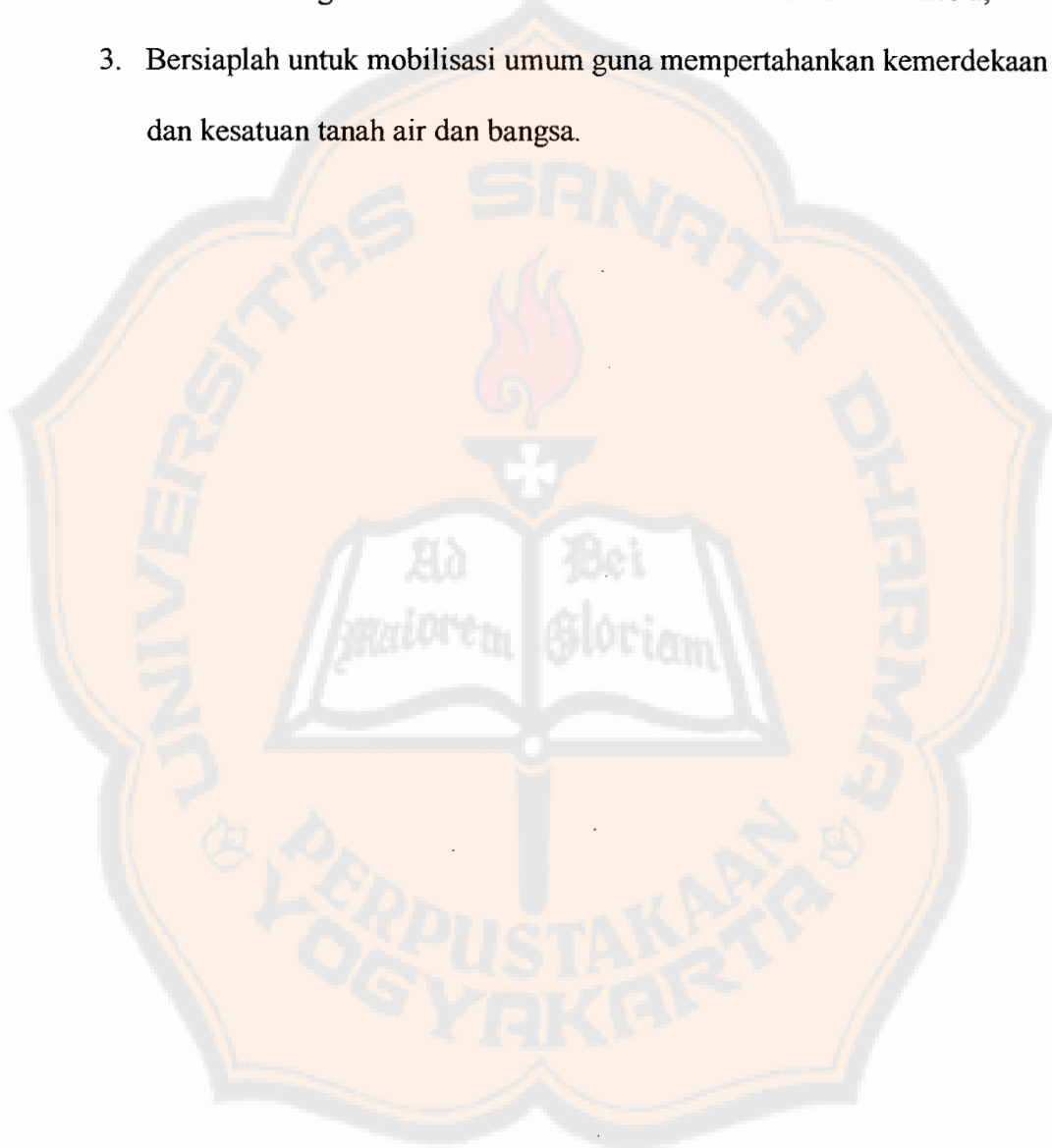


Presiden Soekarno memberikan komando pembebasan Irian Barat



### TRI KOMANDO RAKYAT

1. Gagalkan pembentukan “Negara Papua” buatan Belanda Kolonial;
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.



**PERSETUDJUAN**

**ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KERADJAAN NEDERLAND  
MENGENAI  
IRIAN BARAT**

(Pemerintah) Republik Indonesia dan (Pemerintah) Keradjaan Nederland,

Mengingat kepentingan-kepentingan dan kesedjahteraan rakjat wilajah Irian Barat, jang selandjutnja disebut „wilajah”,

Berhasrat menjelesaikan persengketaan mereka mengenai wilajah tersebut, maka sekarang bersetudju seperti tersebut dibawah ini:

**Pengesjahan Persetudjuan dan Resolusi Madjelis  
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa**

**Pasal I**

Setelah Persetudjuan antara Indonesia dan Nederland sekarang ini ditanda-tangani dan disjahkan oleh kedua belah pihak, Indonesia dan Nederland akan bersama mengadakan rentjana resolusi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa jang mengandung ketentuan-ketentuan bahwa Madjelis Umum mentjatat Persetudjuan sekarang ini, memaklumi peranan Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Persetudjuan tersebut, dan memberikan kuasa kepada Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tugas-tugas jang dipertjajakan kepadanya dalam Persetudjuan ini.

**Pasal II**

Setelah resolusi termaktub dalam Pasal I diterima, Nederland akan menjerahkan pemerintahan diwilajah tersebut kepada Badan Penguasa Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Executive Authority: UNTEA), dibentuk oleh dan dibawah jurisdiksi Sekretaris Djenderal, pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa jang diangkat sesuai dengan Pasal IV. UNTEA selandjutnja akan menjerahkan pemerintahan kepada Indonesia sesuai dengan Pasal XII.

**Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

**Pasal III**

Untuk melantjarkan penjerahan pemerintahan kepada UNTEA setelah diterimanja resolusi oleh Madjelis Umum, Nederland akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengirimkan seorang wakil untuk mengadakan musjawarah singkat dengan Gubernur Nederland dari wilajah tersebut sebelum Gubernur tersebut berangkat.

Gubernur Nederland akan berangkat sebelum kedatangan Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**Pasal IV**

Seorang Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dapat diterima oleh Indonesia dan Nederland, akan diangkat oleh Sekretaris Djenderal.

**Pasal V**

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kepala pelaksana UNTEA, akan berkuasa penuh atas petundjuk-petundjuk Sekretaris Djenderal untuk mendjalankan pemerintahan diwilajah tersebut selama djangka waktu pemerintahan UNTEA sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Pasal VI

Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan selama masa pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengenai pengibaran bendera Indonesia dan bendera Netherland, telah terdapat suatu pengertian bahwa hal tersebut akan ditentukan antara Sekretaris Djenderal dan masing-masing pemerintah yang bersangkutan dalam suatu persetujuan (tersendiri).

## Pasal VII

Sekretaris Djenderal akan menjediakan bagi UNTEA pasukan-pasukan keamanan yang dipandang perlu oleh Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa; pasukan-pasukan demikian itu terutama dimaksudkan untuk memperkuat polisi Irian Barat yang telah ada, dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban umum. Korps Sukarela Irian Barat, yang pada saat tibanja Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti sebagai bagian daripada angkatan bersendjata Netherland, dan angkatan bersendjata Indonesia diwilajah tersebut akan ditempatkan dibawah kekuasaan dan diperuntukkan bagi Sekretaris Djenderal untuk maksud yang sama. Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa sedapat mungkin akan menggunakan polisi Irian Barat sebagai pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dan, atas kebidjaksanaannya mempergunakan angkatan bersendjata Indonesia. Angkatan bersendjata Netherland akan dipulangkan setcepat mungkin dan selama mereka berada diwilajah tersebut akan ditempatkan dibawah pengawasan UNTEA.

## Pasal VIII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan laporan-laporan berkala kepada Sekretaris Djenderal tentang aspek-aspek utama mengenai pelaksanaan Persetujuan ini. Sekretaris Djenderal akan menjampaikan laporan-laporan lengkap kepada Indonesia dan Netherland dan, atas kebidjaksanaannya, dapat menjampaikan laporan kepada Madjelis Umum atau kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

## Taraf Pertama Pemerintahan

### UNTEA

#### Pasal IX

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa setcepat mungkin akan mengganti pedjabat-pedjabat tertinggi Netherland yang termaktub dalam Lampiran A dengan pedjabat bukan-Netherland bukan-Indonesia selama taraf pertama pemerintahan UNTEA yang akan berachir pada tanggal 1 Mei 1963. Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berwenang memperkerdjakan untuk sementara waktu semua pedjabat-pedjabat Netherland, selain dari pada pedjabat-pedjabat tertinggi Netherland termaktub dalam Lampiran A, yang ingin bekerdja pada UNTEA, dengan ketentuan-ketentuan serta sjarat-sjarat yang dapat ditetapkan oleh Sekretaris Djenderal. Sebanjak mungkin orang-orang Irian Barat akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan administratif dan teknis. Untuk mengisi djabatan-djabatan yang diperlukan selebihnja, UNTEA akan berwenang mempekerdjakan pegawai-pegawai yang disediakan oleh Indonesia. Skala gadji yang telah dipakai di Irian Barat akan dipertahankan (diteruskan).

#### Pasal X

Segera setelah penjerahan pemerintahan kepada UNTEA, UNTEA akan mengumumkan dan akan menerangkan setjara luas ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dan akan memberitahukan kepada penduduk perihal penjerahan pemerintahan kepada Indonesia dan ketentuan-ketentuan bagi pelaksanaan penentuan nasib sendiri seperti tertera dalam Persetujuan sekarang ini.

#### Pasal XI

Sepandjang ada persesuaian dengan kata dan djiwa persetujuan sekarang ini, perundang-undangan yang telah ada akan tetap berlaku. UNTEA akan berkuasa mengeluarkan perundang-undangan baru atau mengubahnja dalam djiwa dan rangka persetujuan sekarang ini.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi sebelum dikeluarkanja Undang-undang dan Peraturan-peraturan baru atau diubahnja Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada.

## Taraf Kedua

### Pasal XII

Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi kebidjaksanaan untuk menjerahkan pemerintahan seluruhnja atau sebagian kepada Indonesia setiap waktu sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Kekuasaan UNTEA akan berachir pada saat penjerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia.

### Pasal XIII

Pasukan-pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diganti dengan pasukan-pasukan keamanan Indonesia sesudah taraf pertama pemerintahan UNTEA. Semua pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditarik mundur pada saat penjerahan pemerintahan kepada Indonesia.

## Pemerintahan Indonesia dan Penentuan Nasib Sendiri

### Pasal XIV

Setelah penjerahan tanggung djawab pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, Undang-undang dan Peraturan-peraturan Nasional Indonesia sebagai dasar akan berlaku diwilajah tersebut dengan pengertian bahwa Undang-undang dan Peraturan-peraturan itu sesuai dengan djaminan hak-hak serta kebebasan-kebebasan bagi penduduk menurut ketentuan-ketentuan Persetudjuan sekarang ini.

Undang-undang dan Peraturan-peraturan baru atau perubahan-perubahan pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan jang telah ada dapat didjalankan menurut djiwa Persetudjuan ini.

Dewan-dewan Perwakilan akan dikonsultasi seperlunja.

### Pasal XV

Setelah penjerahan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia, tugas utama Indonesia ialah mempergiat lebih landjut pendidikan rakjat, pemberantasan butahuruf, kemadjuan perkembangan sosial, kebudayaan dan ekonomi.

Sesuai dengan praktek-praktek di Indonesia dewasa ini akan dilakukan pula usaha-usaha untuk mempertjepat ikut seranja Rakjat didalam pemerintahan daerah melalui pemilihan berkala. Tiap aspek jang bertalian dengan perwujudan kebebasan memilih akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetudjuan ini.

### Pasal XVI

Pada saat penjerahan tanggung djawab pemerintahan sepenuhnya kepada Indonesia sedjumlah pegawai ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, jang dianggap mentjukupi oleh Sekretaris Djenderal sesudah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditundjuk untuk tetap tinggal dimana sadja kewadajiban mereka memerlukanja. Sebelum kedatangan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa jang akan ikut-serta pada saat jang wadjar dalam mengadakan usaha-usaha penentuan nasib sendiri kewadajiban mereka akan terbatas pada memberi nasehat dan membantu persiapan-persiapan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan bagi penentuan nasib sendiri, ketjuali bilamana Indonesia dan Sekretaris Djenderal dapat bersetudju bahwa mereka akan mendjalankan pekerdjaan ahli jan glainnja. Mereka akan bertanggung djawab pada Sekretaris Djenderal mengenai pelaksanaan kewadajiban-kewadajiban mereka.

### Pasal XVII

Indonesia akan mempersilahkan Sekretaris Djenderal mengangkat seorang Wakil, jang bersama dengan staf jang, antara lain, terdiri dari pegawai-pegawai tertera dalam pasal XVI, akan melaksanakan kewadajiban Sekretaris Djenderal untuk memberi nasehat, membantu dan ikut-serta dalam usaha-usaha untuk perwujudan kebebasan memilih jang merupakan tanggung djawab Indonesia.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sekretaris Djenderal pada waktu jang wadjar akan mengang-  
kat seorang Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa agar ia dengan  
Stafnja dapat mendjalankan kewadajiban-kewadajiban mereka satu  
tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri. Penambahan  
staf jang sekiranya dipandang perlu oleh wakil Perserikatan  
Bangsa-Bangsa akan ditentukan oleh Sekretaris Djenderal se-  
telah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia.

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnja akan mem-  
punjai kebebasan bergerak jang sama seperti jang diberikan ke-  
pada pegawai-pegawai jang disebut dalam pasal XVI.

### Pasal XVIII

Indonesia, dengan bantuan dan ikut sertanja wakil Perse-  
rikatan Bangsa-Bangsa dan stafnja, akan mengadakan usaha-  
usaha untuk memberi kesempatan kepada rakjat wilajah tersebut  
untuk melaksanakan kebebasan memilih. Usaha-usaha tersebut  
akan mentjakup :

a. Konsultasi (Musjawarah) dengan dewan-dewan perwa-  
kilian mengenai prosedur dan tjara-tjara jang pantas dianut un-  
tuk mengetahui kebebasan pernjataan kehendak rakjat.

b. Penentuan tanggal jang pasti untuk pelaksanaan kebe-  
basan memilih dalam djangka waktu jang ditetapkan oleh Per-  
setudjuan sekarang ini.

c. Perumusan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa  
agar penduduk dapat menentukan (a) apakah mereka ingin tetap  
bergabung dengan Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin me-  
mutuskan hubungan mereka dengan Indonesia.

d. Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan  
warga-negara asing, jang merupakan penduduk pada waktu pe-  
nanda tanganan Persetudjuan dan pada waktu perwujudan  
penentuan nasib sendiri, jang akan dilaksanakan sesuai dengan  
praktek internasional, termasuk penduduk-penduduk jang pergi  
sesudah 1945 dan kembali kedaerah itu untuk bertempat tinggal  
lagi setelah berachirnja Pemerintahan Nederland.

### Pasal XIX

Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melaporkan kepada  
Sekretaris Djenderal tentang usaha-usaha jang telah disiapkan  
untuk perwujudan kebebasan memilih.

### Pasal XX

Perwujudan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan  
sebelum achir tahun 1969.

### Pasal XXI

1. Setelah pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, In-  
donesia dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjam-  
paikan laporan-laporan terachir kepada Sekretaris Djenderal  
jang kemudian akan melaporkan kepada Madjelis Umum ten-  
tang pelaksanaan perwujudan penentuan nasib sendiri serta  
hasil-hasilnja.

2. Pihak-pihak pada persetudjuan sekarang ini akan me-  
ngakui dan menaati hasil-hasil perwujudan penentuan nasib  
sendiri itu.

### Hak-hak Penduduk

### Pasal XXII

1. UNTEA dan Indonesia akan mendjamin sepenuhnya  
hak penduduk daerah tersebut, termasuk hak-hak bebas bitja-  
ra, bebas bergerak dan hak berkumpul dan bersidang. Hak-hak  
ini akan mentjakup hak-hak penduduk wilajah jang telah ada  
pada waktu penjerahan pemerintahan pada UNTEA.

2. UNTEA akan mengoper djandji-djandji Nederland jang  
telah ada mengenai konsesi-konsesi dan hak-hak milik.

3. Setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan, Indo-  
nesia akan mengoper djandji-djandji tersebut jang tidak berten-  
tangan dengan kepentingan dan perkembangan ekonomi rakjat  
wilajah tersebut. Suatu panitya bersama Indonesia — Nederland  
akan dibentuk setelah penjerahan pemerintahan pada Indonesia,  
untuk mempeladjar sifat konsesi-konsesi dan hak-hak milik



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Selama masa pemerintahan UNTEA akan ada kebebasan bergerak bagi orang-orang sipil yang berkewarga-negeraan Indonesia dan Nederland keluar-masuk wilayah itu.

### Pasal XXIII

Lowongan-lowongan dalam dewan-dewan perwakilan disebabkan keberangkatan warganegara-warganegara Nederland, atau karena sebab-sebab lain, akan diisi setjara wajar dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada dengan jalan pemilihan atau pengangkatan oleh UNTEA. Dewan-dewan perwakilan akan dikonsultasi sebelum pengangkatan wakil-wakil baru.

### Soal-soal Keuangan

#### Pasal XXIV

1. Defisit-defisit dalam anggaran belandja dari wilayah selama pemerintahan UNTEA akan dibagi rata antara Indonesia dan Nederland Indonesia dan Nederland akan dikonsultasi oleh Sekretaris Djenderal dalam mempersiapkan anggaran belandja UNTEA, dan hal-hal keuangan lainnja yang berangkutan dengan kewajiban-kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan persetujuan sekarang ini, namun Sekretaris Djenderal berwenang memberikan keputusan terachir.

2. Kedua belah pihak dari Persetujuan sekarang ini akan membayar kembali kepada Sekretaris Djenderal semua pengeluaran yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Persetujuan ini dan akan menjediakan uang muka setjuknja untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban Sekretaris Djenderal. Kedua belah pihak dari Persetujuan ini akan membagirata pembayaran kembali seperti tersebut diatas dan pengeluaran-pengeluaran uang muka tersebut.

### Perdjandjian-Perdjandjian dan Persetudjuan-Persetudjuan terdahulu

#### Pasal XXV

Persetudjuan sekarang ini akan berlaku lebih kuat daripada setiap perdjandjian terdahulu mengenai wilayah Irian Barat.

Perdjandjian-perdjandjian dan persetujuan-persetudjuan terdahulu mengenai wilayah Irian Barat oleh karenanja dapat dibatalkan (d disesuaikan seperlunja) dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan sekarang ini.

### Kelonggaran dan kekebalan

#### Pasal XXVI

Untuk pelaksanaan Persetujuan sekarang ini, Indonesia dan Nederland akan menjalankan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap milik, uang, modal dan para pegawai dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teristimewa Penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut Pasal IV dan Wakil Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diangkat menurut Pasal XVII, akan mendapat kelonggaran dan kekebalan seperti yang ditjantumkan dalam pasal XIX dari Konvensi mengenai Kelonggaran dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### Ratifikasi

#### Pasal XXVII

1. Persetujuan sekarang ini akan diratifikasikan menurut prosedur-prosedur konstitutionil daripada kedua belah pihak yang mengadakan Persetujuan.
2. Piagam-Piagam ratifikasi akan ditukar selekas mungkin di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh wakil-wakil tetap dari kedua belah pihak di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnja akan membuat berita atjara dari penukaran piagam ratifikasi tersebut dan akan menjampaikan turunan yang disjahkan kepada masing-masing pihak.

### Waktu Mulai Berlakunja Persetujuan

#### Pasal XXVIII

1. Persetujuan sekarang ini mulai berlaku pada tanggal Madjelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima resolusi seperti yang tertera di Pasal I dari Persetujuan sekarang ini.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

15 Agustus 1962

2. Pada saat berlakunja, Persetujuan sekarang ini akan ditjatat oleh Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## Naskah Resmi

### Pasal XXIX

Naskah resmi Persetujuan sekarang ini telah disusun dalam bahasa Inggris. Terdjemahannja dalam bahasa Indonesia dan Nederland akan dipertukarkan antara kedua belah pihak.

Demi untuk penjaksian segala itu, maka wakil-wakil berkuasa penuh jang bertanda-tangan dibawah ini dan jang diberi wewenang lengkap oleh masing-masing pemerintahnja menandatangani Persetujuan sekarang ini.

Dibuat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada hari kelimabelas bulan Agustus 1962 dalam tiga ganda kembar, diantaranya satu ganda disampaikan kepada Sekretaris Djenderal dan selcbihnja disampaikan kepada Pemerintah masing-masing pihak jang mengadakan persetujuan ini.

(ttd.) Subandrio  
Untuk Republik Indonesia

(ttd.) J. Herman van Roijen  
Untuk Keradjaan Nederland

(ttd.) C.W.A. Schurmann  
Untuk Keradjaan Nederland

## LAMPIRAN A PADA PERSETUDJUAN

Pedjabat-pedjabat tertinggi Belanda jang harus diganti setjepat mungkin oleh pedjabat-pedjabat bukan-Nederland dan bukan-Indonesia.

I. <b>Pemerintah</b>	
Kepala Biro Penerangan Pemerintah	1
Kepala Dinas Penerangan Rakjat	1
II. <b>Departemen Dalam Negeri</b>	
Direktur	1
Kepala <sup>2</sup> Daerah („Residen <sup>2</sup> “):	6
1. Hollandia	
2. Biak	
3. Manokwari	
4. Fak Fak	
5. Merauke	
6. Dataran-tinggi Tengah	
Kepala Administratip Polisi	1
III. <b>Departemen Keuangan</b>	
Direktur	1
IV. <b>Departemen Urusan Sosial dan Kehakiman</b>	
Direktur	1
V. <b>Departemen Kesehatan</b>	
Direktur	1
VI. <b>Departemen Urusan Kebudayaan (termasuk Pendidikan)</b>	
Direktur	1
Kepala Siaran	1
VII. <b>Departemen Urusan Ekonomi</b>	
Direktur	1
VIII. <b>Departemen Pengangkutan dan Tenaga</b>	
Direktur	1
IX. <b>Departemen Pekerdjaan Umum</b>	
Direktur	1

Djumlah 18

**NASKAH RENTJANA RESOLUSI INDONESIA — BELANDA  
JANG DIADJUKAN PADA DAN TELAH DITERIMA OLEH  
MADJELIS UMUM P.B.B.  
PADA TGL. 21 SEPTEMBER 1962.**

Madjelis Umum, menimbang bahwa Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda telah menjelesaikan pertikaian mereka mengenai New Guinea Barat (Irian Barat).

Mentjatat dengan penghargaan usaha-usaha jang berhasil daripada Pedjabat Sekretaris Djenderal untuk mewudjudkan penjelesaian setjara damai ini.

Setelah memahami persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Belanda tentang New Guinea Barat (Irian Barat).

1. Memperhatikan persetudjuan itu ;
2. Mengakui peranan jang diserahkan kepada Sekretaris Djenderal didalam persetudjuan itu ;
3. Menguasakan kepada Sekretaris Djenderal untuk melaksanakan tugas jang dipertjajakan kepadanja didalam persetudjuan.

**PERNJATAAN PENDAPAT DPR-GR TENTANG PERSETU-  
DJUAN INDONESIA-NEDERLAND MENGENAI PENJE-  
RAHAN IRIAN BARAT KEPADA REPUBLIK  
INDONESIA.**

**PERNJATAAN PENDAPAT DPR — GR**

**TENTANG**

**PERSETUDJUAN INDONESIA — NEDERLAND**

**MENGENAI**

**PENJERAHAN IRIAN BARAT**

**KEPADA**

**REPUBLIK INDONESIA**

Diambil dengan suara bulat dalam sidang lengkap D.P.R. — G.R.  
tanggal 1 September 1962.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong dalam rapat  
plenonja tanggal 1 September 1962,

**Mendengar :**

- a. Keterangan Pemerintah yang diucapkan oleh Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam rapat gabungan Komisi-Komisi dan rapat-kerja gabungan Komisi A dan C DPR-GR pada tanggal 31 Agustus 1962 mengenai persetujuan Indonesia-Nederland mengenai penjerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia ;
- b. Pendapat dan pandangan Golongan-Golongan dalam DPR-GR.

**Mengingat :**

- a. Ketetapan MPRS No. I/1960 ;
- b. Trikora ;
- c. Pidato P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 17 Agustus 1962 yang berjudul „Tahun Kemenangan”.

**Menimbang :**

Bahwa Persetujuan Indonesia-Nederland yang ditandatangani tanggal 15 Agustus 1962 dapat dipergunakan sebagai alat perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Memutuskan:

1. Membenarkan dan menyetujui kebidjaksanaan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dalam menerima persetujuan Indonesia-Nederland yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia dan tetap memberi kepastiaan sepenuhnya kepada P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya;
2. Mengajak dan menjerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk lebih memperkuat persatuan dan mempertinggi kewaspadaan nasional.

**Pimpinan**  
**Dewan Perwakilan Rakyat**  
**Gotong Rojong;**

(ttd.) **H. Z. Arifin.**

**Ketua**

(ttd.) **Mr Djoko Soemarjono**

**Sekretaris**

## PERINTAH

**Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik**  
**Indonesia, Panglima Besar Komando Tertinggi**  
**Pembebasan Irian Barat**

tentang

## PENGHENTIAN PERMUSUHAN BELANDA — INDONESIA

- I. Berdasarkan persetujuan Republik Indonesia dan Belanda yang ditandatangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 jam 21.00 GMT permusuhan dihentikan pada tanggal 18 Agustus 1962 jam 00.01 GMT atau tanggal 18 Agustus 1962 jam 09.31 waktu Irian Barat;
- II. PERINTAH:
  1. Hentikan tembak-menembak dan permusuhan mulai tanggal 18 Agustus 1962 jam 09.31 waktu Irian Barat;
  2. Adakan konsolidasi kedalam dan tetap waspada;
  3. Siapkan diri untuk menerima perintah lebih lanjut untuk tugas-tugas baru di Irian Barat;
- III. Dengan ini disertakan kutipan perintah Belanda kepada pasukannya;
- IV. SELESAI.

DJAKARTA, 16 AGUSTUS 1962  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI APRI  
PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI  
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

**Kepada**  
**SEMUA GERILJAWAN INDONESIA**  
**di DARATAN IRIAN BARAT**



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2

## KUTIPAN PERINTAH UNTUK TENTARA BELANDA SETELAH PENGHENTIAN TEMBAK-MENEMBAK

### 1. Situasi.

A. Gentjatan sendjata semendjak tgl. 18 Agustus djam 00.01 GMT (7.30 djam Djawa).

B. Setelah waktu tersebut tugas tentara Belanda merupakan tugas polisi belaka.

Mempergunakan sendjata hanja diperbolehkan kalau terpaksa mempertahankan diri, untuk menjelamatkan objek-objek militer dan instalasi-instalasi pemerintah dan pula untuk melindungi penduduk dan mendjaga tata-tertib (keamanan) atas permintaan pemerintah sipil.

C. Hindari segala insiden-insiden.

Tiap adanja kedjadian-kedjadian (insiden-insiden) baru, termasuk infiltrasi Indonesia harus segera dilaporkan kepada Panglima Tentara Belanda di Irian Barat dan pula kepada wakil P.B.B. bila ada.

Menggunakan sendjata dibatasi dengan peraturan-peraturan jang termaktub dalam pasal B.

### 2. Tugas (Missi).

Menaati peraturan-peraturan jang termaktub dalam pasal 1.

### 3. Pelaksanaan.

Bila, setelah gentjatan sendjata jang berlaku semendjak tanggal 18 Agustus, djam 00.01 GMT, ada infiltrators jang hendak mentjari hubungan tanpa mempunjai maksud jang bermusuhan, harus bertindak sebagai berikut :

Pertama : tentukan suatu titik pertemuan diluar tempat kedudukan sendiri.

Kedua : kalau makanan/atau obat-obatan diperlukan harap serahkan kepada Penindjau P.B.B. bila ada, kalau tidak harap berikan asalkan dalam mengambilnya mereka datang tanpa bersendjata.

Ketiga : Tiadakan infiltrators jang bersendjata kalau perlu dengan kekerasan dari daerah kita.

Lampiran 3

KOMANDO MANDALA  
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

## PERINTAH

I. Mengingat perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat tgl. 16 Agustus 1962 tentang :

### PENGHENTIAN PERMUSUHAN BELANDA—INDONESIA

II. Diperintahkan kepada :

Seluruh pasukan jang termasuk slagorde Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, jang berada di Daratan Irian Barat.

Untuk :

a. Menaati dan melaksanakan dengan penuh Keinsjafan dan tanggungjawab perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, tentang Penghentian Permusuhan Belanda—Indonesia.

b. Mengadakan Kontak dengan Perwira-Perwira penindjau P.B.B. terdekat jang disertai Perwira-Perwira penghubung dari pihak Indonesia jaitu;

1. Brigadier Djenderal Achmad Wiranatakusuma.

2. Kolonel Udara I. Dewanta.

3. Letnan Kolonel Pelaut Nizam Zachman.

III. Perbekalan akan segera diterdjunkan dari udara oleh Pesawat P.B.B., didaerah Droppings Zône baru setelah ada hubungan.

IV. Selesai.

Dikeluarkan di : Komando Mandala

Pembebasan Irian Barat

Pada tanggal : 25 Agustus 1962

SUHARTO

## **GLOSSARY**

- BPPK: Badan Pengarahan Potensi Kerja
- DEKON: Deklarasi Ekonomi
- DPA: Dewan Perimbangan Agung
- DPAS: Dewan Pertimbangan Agung Sementara
- DPN: Dewan Perancang Nasional
- DPR: Dewan Perwakilan Rakyat
- DPRGR: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
- GBHN: Garis-garis Besar Haluan Negara
- IPKI: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
- KOTI: Komando Operasi Tertinggi
- KOTOE: Komanado Operasi Tertinggi Ekonomi
- MANIPOL: Manifesto Politik
- MPN: Majelis Pimpinanana Negara
- MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat
- MPRS: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
- NASAKOM: Nasionalis, Agama, Komunis
- NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia
- NU: Nahdatul Ulama
- PARAN: Penertiban Aparatur Negara
- PARKINDO: Partai Kristen Indonesia
- PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa
- PERTI: Persatuan Tarbiyah Islamiah

PKI: Partai Komunis Indonesia

PNI: Paratai Nasional Indonesia

PPKI: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

RESOPIM: Revolusi Sosialisme Pimpinan

RI: Republik Indonesia

RIL: Revolusi, Ideology, Leadership

RIS: Republik Indonesia Serikat

SOB: Darurat

TNI-AD: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat

UNTEA: United Nations Temporary Executive Authority

USDEK: Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin,  
Kepribadian Indonesia

UUD: Undang-Undang Dasar

UUDS: Undang-Undang Dasar Sementara

